



***“HOMELESS”***  
**SEBAGAI SALAH SATU BENTUK**  
**KEMISKINAN STRUKTURAL**

**SKRIPSI**

**SANTI SITORUS**

**NPM 0704080507**

**PROGRAM STUDI JEPANG**  
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**DEPOK**  
**2008**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

***“HOMELESS”***  
**SEBAGAI SALAH SATU BENTUK**  
**KEMISKINAN STRUKTURAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**  
**Sarjana Humaniora**

**SANTI SITORUS**

**NPM 0704080507**

**Pengutamaan: Masyarakat Jepang**

**Program Studi Jepang**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA**

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Depok, 2008**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2008

### DEWAN PENGUJI

Ketua

(Ansar Anwar, S.S)

Sekretaris

(Dr. Etty Nurhayati Anwar)

Pembimbing I

(Yenny Simulya, MA)

Pembimbing II (Pembaca I)

(Sri Ayu Wulansari, M.Si)

Pembaca II

(Dr. Etty Nurhayati Anwar)

Disahkan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2008 oleh:

Ketua Jurusan/  
Kepala Program Studi

( Jonnie Rasmada Hutabarat, M.A.)

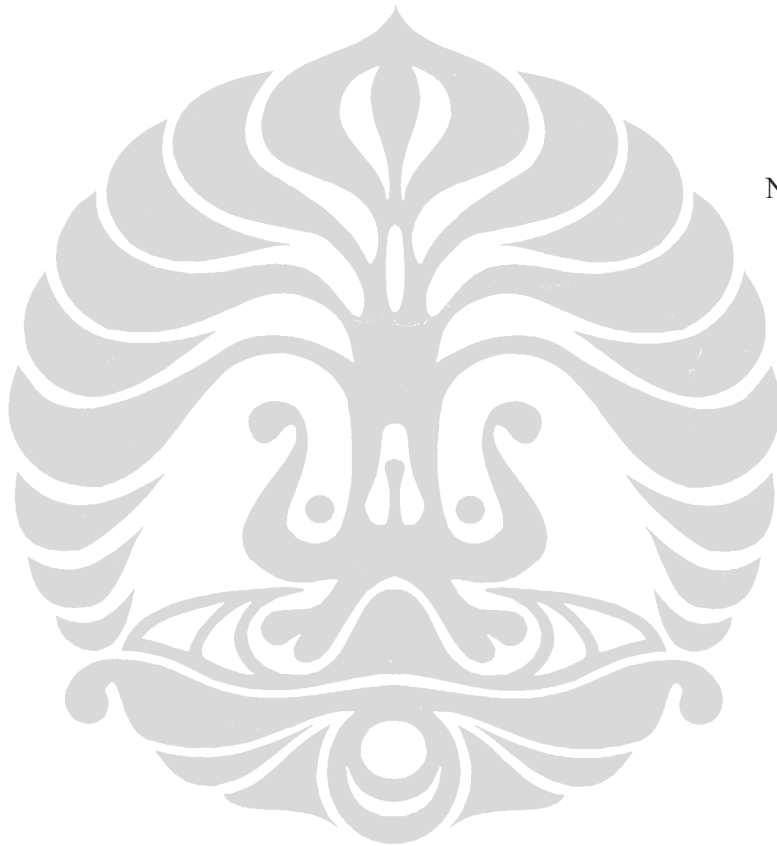
Dekan

(Dr. Bambang Wibawarta)

Seluruh isi skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Depok, 17 Juli 2008

Penulis



Santi Sitorus  
NPM 0704080507

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih, karena atas berkat dan kasih-Nya yang sungguh luar biasa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Program Studi Jepang pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

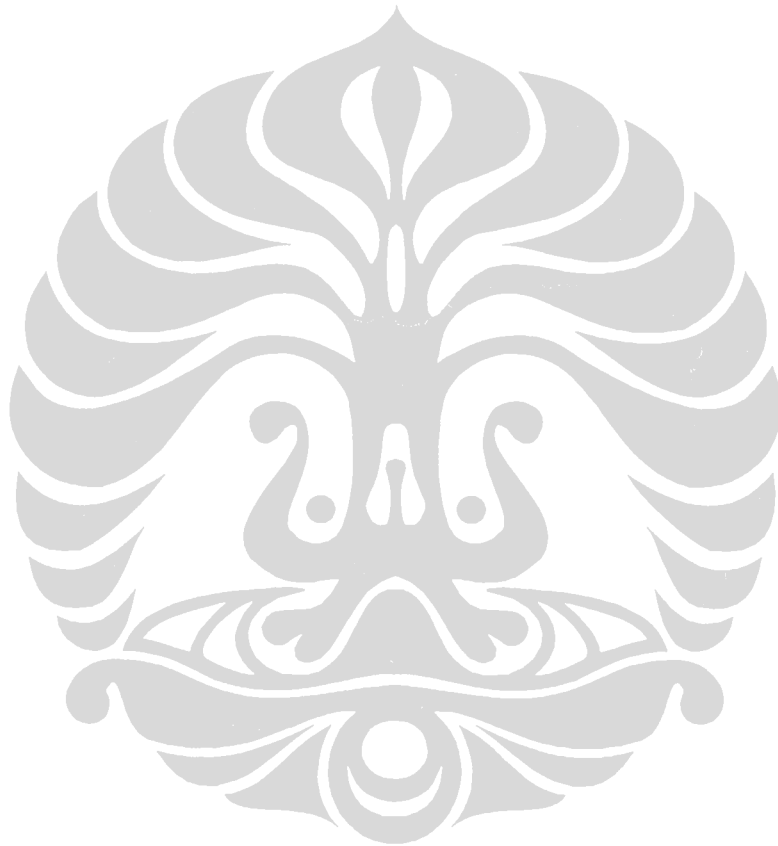
1. Orangtua tersayang dan keluarga yang tidak pernah lupa membawa penulis dalam doa yang hidup dan telah memberikan bantuan dukungan material maupun moril.
2. Ibu Yenny Simulya, MA (*SIM sensei*), selaku dosen pembimbing dan Wulan *sensei* yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Jepang yang selama ini telah menanamkan ilmunya kepada penulis sehingga mampu membuat tulisan ini.
4. Dewan Penguji yang telah bersedia menyediakan waktu dan menyumbangkan pikiran dalam menguji hasil penelitian dan memberikan masukan demi penyempurnaan hasil penelitian ini.
5. Ibu Dr. Ety Nurhayati Anwar, selaku pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam mengurus berbagai hal akademis.
6. Bapak Jonnie Rasmada Hutabarat, selaku Ketua Program Studi Jepang yang telah membantu penulis dalam mengurus berbagai hal akademis.
7. Pihak Japan Foundation Kansai Center dan Japan Foundation Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengamati secara langsung keadaan para *homeless* di Jepang sebagai objek penelitian dan memberikan informasi baik lisan maupun tulisan.

8. Mimi, sahabat yang baik yang telah banyak membantu penulis melewati masa-masa dalam menyusun skripsi ini.
9. Uzi, Rinita, Hara, Ufi, Nuru, dan Mita, sahabat yang baik yang telah menemani penulis melewati hari-hari di kampus dan di luar kampus.
10. Roslia dan Q-ting, teman kos yang telah memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman Jepang angkatan 2004 yang telah menemani masa-masa yang berkesan selama kuliah.
12. Teman-teman PO FIB UI yang telah setia mendoakan penulis dan memberikan dukungan rohani selama kuliah dan selama mengerjakan skripsi.
13. Pihak KS4 yang telah memberikan beasiswa, sehingga penulis terbantu dalam hal keuangan, khususnya dalam mengatasi pengeluaran selama menyusun skripsi.

Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Skripsi ini dibuat guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Jepang, Ilmu pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Semoga hasil skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan pihak yang berkepentingan.

Depok, 8 Juli 2008

Penulis



**Untuk ADIKku tersayang,**

**DESYANA SITORUS**

**(I love you my BELOVED SISTER...)**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PRAKATA</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL DAN GRAFIK</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Masalah Penelitian .....	4
1.3 Batasan Penelitian .....	5
1.4 Kerangka Teoritis .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	11
1.5 Metodologi Penelitian .....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB 2 KEMISKINAN STRUKTURAL SEBAGAI AKIBAT DARI STRUKTUR EKONOMI JEPANG KONTEMPORER</b> .....	13
2.1 Struktur Industri .....	14
2.2 Struktur Tenaga Kerja dalam Perusahaan .....	17
2.3 Kemiskinan Struktural .....	22
<b>BAB 3 ANALISIS <i>HOMELESS</i> SEBAGAI SUATU BENTUK KEMISKINAN STRUKTURAL</b> .....	25
3.1 Definisi dan Konsep <i>Homeless</i> .....	25
3.2 Latar Belakang Historis .....	32
3.3 Kondisi <i>Homeless</i> di Jepang .....	34
3.3.1 Jumlah <i>Homeless</i> .....	34
3.3.2 Karakteristik <i>Homeless</i> .....	36
3.4 Jenis <i>Homeless</i> .....	42
3.5 <i>Homeless</i> sebagai Dampak Kemiskinan Struktural .....	45
3.5.1 <i>Homeless</i> dari Kaum Buruh Harian <i>Yoseba</i> .....	45
3.5.1.1 Pengaruh Sistem <i>Keiretsu</i> .....	46
3.5.1.2 Pengaruh Struktur Kesempatan Kerja .....	47
3.5.2 <i>Homeless</i> dari Pekerja Reguler dan Non Reguler .....	51
3.6 Analisis Faktor Non Ekonomis .....	54
3.6.1 Sistem Kesejahteraan Sosial .....	54
3.6.2 Kebijakan Perumahan .....	57
3.7 Respon Pemerintah .....	58
<b>BAB 4 KESIMPULAN</b> .....	63
<b>BIBLIOGRAFI</b> .....	65
<b>LAMPIRAN</b> .....	68
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	76



## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

### Daftar Tabel

Tabel 1 Rasio struktur industri.....	14
Tabel 2 Rasio jumlah pekerja berdasarkan struktur industri.....	15
Tabel 3 Jumlah pekerja reguler dan pekerja non reguler di perusahaan Jepang...	20
Tabel 4 Angka pengangguran dari tahun 1990-2006.....	22
Tabel 5 Indikator garis kemiskinan berdasarkan standar <i>seikatsuhogo</i> .....	31
Tabel 6 Jumlah <i>homeless</i> di Jepang .....	34
Tabel 7 Hasil penelitian jumlah <i>homeless</i> di Tokyo .....	35
Tabel 8 Karakteristik berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan .....	37
Tabel 9 Laki-laki <i>mikon</i> di Jepang.....	40
Tabel 10 Tempat tinggal para <i>homeless</i> .....	41
Tabel 11 Pekerjaan terlama dan pekerjaan terakhir sebelum menjadi <i>homeless</i> ..	43
Tabel 12 Rata-rata jumlah <i>homeless</i> di prefektur Kanagawa.....	50
Tabel 13 Angka pengangguran berdasarkan umur.....	54
Tabel 14 Jumlah penerima bantuan <i>seikatsuhogo</i> berdasarkan struktur keluarga dalam populasi penduduk Jepang .....	55

### Daftar Grafik

Grafik 1 Rasio struktur industri .....	15
Grafik 2 Rasio jumlah pekerja berdasarkan struktur industri .....	16
Grafik 3 Pandangan perusahaan terhadap sistem <i>shūshinkoyō</i> (%).....	18
Grafik 4 Jumlah perusahaan dan pegawai yang mengalami kebangkrutan .....	21
Grafik 5 Jumlah <i>homeless</i> di Tokyo .....	35
Grafik 6 Persentase jumlah <i>homeless</i> berdasarkan kelompok usia.....	38
Grafik 7 Jumlah buruh harian yang terdaftar di <i>Yoseba</i> seluruh Jepang.....	48
Grafik 8 Jumlah <i>homeless</i> yang berasal dari <i>yoseba</i> .....	51

## ABSTRAK

Nama : Santi Sitorus

Pembimbing : Yenny Simulya, MA

Program Studi : Jepang

Judul : *Homeless* sebagai Salah Satu Bentuk Kemiskinan Struktural

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang juga dapat terjadi di negara maju, seperti Jepang. Penelitian ini berfokus pada salah satu bentuk kemiskinan di Jepang pada masa kontemporer, yaitu *homeless*. Sebelum tahun 1990-an, fenomena *homeless* tidak tampak ke permukaan karena jumlahnya terhitung sangat sedikit. Akan tetapi, sejak pecahnya gelembung ekonomi pada awal tahun 1990-an, jumlah *homeless* semakin bertambah dan telah tampak ke permukaan seiring dengan masa resesi ekonomi yang berkepanjangan. *Homeless* ini berasal dari tiga komunitas besar, yaitu *homeless* yang berasal dari kaum buruh harian di *yoseba*, pekerja reguler, dan non reguler.

Melalui studi literatur, skripsi ini menganalisa bagaimana struktur ekonomi dan non ekonomi mempengaruhi munculnya *homeless* dari ketiga komunitas tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya *homeless* dari ketiga komunitas tersebut dipengaruhi oleh struktur industri, struktur kesempatan kerja dalam industri sekunder, dan perubahan sistem tenaga kerja dalam perusahaan Jepang. Skripsi ini menyimpulkan bahwa munculnya *homeless* di Jepang merupakan salah satu bentuk kemiskinan struktural.

---

**Kata Kunci: Kemiskinan, *Homeless*, Kemiskinan Struktural**

## ABSTRACT

Name : Santi Sitorus

Advisor : Yenny Simulya, MA

Study Program: Japanese Studies

Title : *Homeless* sebagai Salah Satu Bentuk Kemiskinan Struktural

One of the social problems which also occurred in developed country such as Japan was poverty. This research is focused on “homeless”, one of the poverty forms. Before 1990s, the phenomenon of homelessness did not emerge because of its small number. However, since the bubble economy and prolonged recession in the beginning of 1990s, the homelessness had appeared on the surface because of the increasing number of homeless people. Currently, homeless people come from three communities, such as daily labors at *yoseba*, regular and irregular workers.

Through literature study, this thesis analyzed how economic structure and non economic structure influenced the occurrence of homelessness from those three communities. This research showed that homelessness of such communities was influenced by industry structure, work opportunities in secondary industry, and transformation of manpower system in Japanese company. This thesis concluded that homelessness in Japan is one of the structural poverty.

---

**Keywords: Poverty, Homeless, Homelessness, Structural Poverty**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan (*hinkon* • 貧困) merupakan persoalan yang sangat mendasar karena di satu pihak menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dan di pihak lain kemiskinan merupakan indikator ketidakberhasilan dalam proses pembangunan termasuk dalam mewujudkan suatu negara yang makmur (*fukushi kokka* • 福祉国家). Kemiskinan menunjukkan adanya stratifikasi sosial ekonomi yang terdiferensial yang justru merupakan tanda dari perkembangan sosial dan ekonomi yang timpang. Sebagai indikator, kemiskinan merupakan tanda tidak hanya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi (*keizai kakusa* • 經濟格差) tetapi juga tanda dari kemunduran berbagai institusi sosial di dalam memecahkan persoalan penduduk. Kemiskinan umumnya ditandai dengan ketimpangan atau kesenjangan, antara lain kepemilikan sumber daya, kesempatan berusaha, keterampilan, dan faktor lain yang menyebabkan perolehan pendapatan

tidak seimbang dan mengakibatkan struktur sosial yang timpang. Substansi kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Masalah kesenjangan adalah masalah keadilan yang berkaitan dengan masalah sosial dan masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Tidak hanya terjadi di negara sedang berkembang seperti Indonesia, masalah kemiskinan juga tengah dikhawatirkan di Jepang akhir-akhir ini yang merupakan salah satu negara maju dan terkaya di dunia. Berdasarkan laporan OECD (Organisasi untuk Kerjasama serta Pembangunan Ekonomi, yaitu suatu Organisasi negara-negara Industri Maju (*keizai kyōryokukikō* • 經濟協力機構)) tahun 2004, Jepang berada pada urutan kelima<sup>1</sup> negara yang tingkat kemiskinannya paling banyak di antara negara-negara maju (OECD), yaitu 15,3%.<sup>2</sup> Di antara negara maju, kemiskinan di Jepang masih terhitung sedikit karena di negara ini telah berkembang organisasi-organisasi non profit (NPO-Non Profit Organization) yang menggerakkan tenaga sukarelawan dan bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu menangani masalah-masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Kemiskinan di Jepang terlihat dari semakin besarnya kesenjangan (*kakusa*) dalam masyarakat Jepang, sebuah negara maju yang sebelumnya dikenal sebagai negara yang paling merata tanpa kesenjangan yang menyolok. Istilah *kakusa* ini pun bisa diterapkan di hampir semua bidang kehidupan masyarakat Jepang, seperti *kakusa shakai* • 格差社会<sup>3</sup> (masyarakat berkesenjangan, *social disparities/gap*), *shotoku kakusa* • 所得格差 (kesenjangan pendapatan, istilah ekonominya *income inequality*), *gakuryoku kakusa* • 学力格差 (kesenjangan kemampuan belajar), *keizai kakusa* • 經濟格差 (kesenjangan ekonomi), *chiiki kakusa* • 地域格差

<sup>1</sup> Di urutan pertama adalah Meksiko, urutan kedua adalah Amerika, urutan ketiga adalah Turki, dan urutan keempat adalah Irlandia.

<sup>2</sup> Masami, Iwata. *Gendai no hinkon-wākingupuā-hōmuresu-seikatsuhogo* (Tokyo: Chikuma Shinsho, 2007), hlm. 073. Tingkat kemiskinan diukur dari jumlah orang-orang yang berada pada kelompok yang berpenghasilan di bawah 50% dari penghasilan rata-rata negara-negara tersebut.

<sup>3</sup> Istilah *Kakusa Shakai* secara harfiah diterjemahkan sebagai masyarakat berkesenjangan, yaitu kesenjangan antara orang atau masyarakat yang kaya dan yang miskin, baik itu dalam hal pendapatan maupun standard hidup yang pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat.

(kesenjangan wilayah), dan lainnya. Masalah masyarakat berkesenjangan juga tidak luput dari negara maju lainnya seperti AS, Prancis, dan Inggris.

Terjadinya kesenjangan yang semakin menyolok dalam masyarakat Jepang kontemporer membawa perubahan dalam struktur stratifikasi sosial masyarakat Jepang. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya masyarakat kelas bawah (*kasô shakai* • 下層社会) yang menempati posisi terbawah dalam stratifikasi sosial Jepang. Kesadaran kelas sebagai kelas menengah (*chûryûkaikyû* • 中流階級) sudah semakin berkurang dalam masyarakat Jepang, sedangkan masyarakat yang menganggap dirinya sebagai kelas atas (*jôryûkaikyû* • 上流階級) maupun kelas bawah (*karyûkaikyû* • 下流階級) juga semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya jumlah *homeless* (*ho-muresu*<sup>4</sup>), *furiitaa*, dan *working poor*<sup>5</sup> di Jepang yang telah menjadi masalah kontemporer Jepang dewasa ini. Masyarakat yang tergolong kelas bawah adalah buruh harian (*hiyatoi rôdôsha* • 日雇労働者), *homeless* • ホームレス, dan pekerja asing (*gaikokujinrôdôsha* • 外国人労働者) (Hideo Aoki, 2006, hlm. 3).

Saat ini, masalah *homeless* atau tuna wisma merupakan masalah sosial yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat Jepang. Penelitian mengenai masalah ini pun semakin berkembang. Sebelum tahun 1990-an keberadaan *homeless* tidak tampak ke permukaan karena jumlahnya yang terhitung sangat sedikit dan hanya merupakan fenomena sementara di kalangan kaum buruh harian di *yoseba*<sup>6</sup> yang tidak mendapatkan lowongan pekerjaan, tetapi sejak pertengahan tahun 1990-an, seiring dengan masa resesi ekonomi yang berkepanjangan di Jepang, jumlah *homeless* semakin meningkat dan telah tampak ke permukaan dengan munculnya *homeless* yang berasal dari kalangan pekerja reguler (pekerja tetap) dan non reguler (pekerja tidak tetap). Saat ini *homeless* dapat di temukan di berbagai area, seperti taman umum, bantaran sungai, stasiun

<sup>4</sup> *hômuresu*: ホームレス adalah istilah serapan dari bahasa Inggris, yaitu *homeless*.

<sup>5</sup> meskipun telah bekerja keras tapi masih saja miskin atau tak mampu menggapai standar hidup (*working, but poor*).

<sup>6</sup> Suatu institusi atau tempat para buruh harian untuk mencari lowongan pekerjaan dan menunggu panggilan kerja.

kereta dan kereta bawah tanah, serta tempat umum lainnya. Karakteristik *homeless* di Jepang juga unik, yaitu sudah tua dengan usia rata-rata 59,5 tahun, mayoritas tidak menikah (*mikon*), dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian terakhir yang dilakukan oleh Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang pada tahun 2007 mengenai alasan mereka menjadi *homeless*, mayoritas memiliki alasan yang bersifat ekonomi (58%), yaitu pekerjaan berkurang (31,4) dan bangkrut sehingga kehilangan pekerjaan (26,6%). Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kesempatan kerja dalam industri sekunder (manufaktur dan konstruksi) akibat perubahan yang terjadi dalam struktur ekonomi Jepang dan meningkatnya jumlah pengangguran sesudah pecahnya balon ekonomi Jepang akibat krisis ekonomi yang melanda Jepang pada awal tahun 1990-an. Demikianlah latar belakang masalah *homeless* sebagai salah satu bentuk kemiskinan di Jepang.

## 1.2 Masalah Penelitian

Masyarakat dunia mengenal Jepang sebagai salah satu negara maju yang memiliki masyarakat yang kaya (*yutaka na shakai* • 豊かな社会). Munculnya *homeless* sebagai simbolik kemiskinan ekstrim merupakan gambaran kontras dari negara maju seperti Jepang. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini terfokus pada munculnya *homeless* sebagai suatu bentuk kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh struktur ekonomi dan non ekonomi yang mengatur kehidupan masyarakat Jepang cenderung membatasi akses kelompok tertentu di dalam konsumsi barang dan berbagai kesempatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.

Berlandaskan teori kemiskinan struktural melalui pendekatan sosiologis, skripsi ini akan menganalisa bagaimana struktur ekonomi dan non ekonomi mempengaruhi munculnya *homeless* di Jepang. Struktur ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah struktur industri dan struktur tenaga kerja dalam perusahaan Jepang; struktur non ekonomi adalah sistem kesejahteraan sosial, yaitu

jaminan perlindungan hidup (*seikatsu hogo* • 生活保護) dan kebijakan atau peraturan dalam hal perumahan.

### 1.3 Batasan Penelitian

Skripsi ini akan membatasi masalah *homeless* yang muncul sejak tahun 1990-an sampai sekarang atau kontemporer. *Homeless* pada masa ini berasal dari tiga komunitas besar, yaitu *homeless* yang berasal dari kaum buruh harian di *yoseba*, pekerja reguler (pekerja tetap), dan non reguler (pekerja tidak tetap).

### 1.4 Kerangka Teoritis

Untuk memahami istilah *homeless*, perlu memahami terlebih dahulu konsepsi kemiskinan itu. Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk menaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya. Tata nilai itu sangat dinamis, semakin lama mengarah ke sifat-sifat materialis. Pandangan ini memperlihatkan luasnya cakupan tentang dimensi kemiskinan.<sup>7</sup>

Di Jepang, pandangan masyarakat mengenai kemiskinan, khususnya masalah *homeless* masih dangkal, sehingga banyak peneliti yang telah mulai mengembangkan studi tentang kemiskinan. Secara konseptual, masalah penyebab munculnya *homeless* dapat dicermati dalam beberapa pendekatan teori kemiskinan. Untuk mengetahui penyebab kemiskinan di Jepang, berikut ini akan diberikan dua persepsi tentang penyebab wujud kemiskinan yakni: pertama, kemiskinan yang disebabkan oleh kebudayaan kemiskinan dan kedua, kemiskinan

---

<sup>7</sup> Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah-Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* (Jakarta-Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hlm. 167.



yang disebabkan oleh sistem yang berjalan (struktural). Kedua bentuk penyebab kemiskinan tersebut, tentulah memiliki karakteristik yang berbeda.

Tokoh utama yang menggunakan teori kebudayaan kemiskinan adalah *Oscar Lewis* (1966). Dengan konsep *cultural of poverty* atau lebih tepat disebut *subculture of poverty*, Lewis berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu budaya yang berlangsung lama dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi terbiasa terhadap cara hidup miskin. Kemiskinan menunjuk pada adanya suatu cara hidup yang secara bersama dialami dan dilakukan oleh orang-orang miskin dalam suatu konteks sejarah dan sosial tertentu. Lewis hendak menjelaskan bahwa ada seperangkat nilai yang dianut oleh komunitas di mana saja yang menyebabkan komunitas itu sulit keluar dari lingkaran kebudayaan kemiskinan.

Oscar Lewis merupakan salah satu dari penulis utama yang mendefinisikan kebudayaan kemiskinan sebagai suatu nilai yang dianut dari generasi ke generasi. Dia menulis,

Once the culture of poverty has come into existence it tends to perpetuate itself. By the time slum children are six or seven they have usually absorbed the basic attitudes and values of their subculture. Thereafter they are psychologically unready to take full advantage of changing conditions or improving opportunities that may develop in their lifetime. (Scientific American, October 1966 dikutip oleh Ryan, 1976: 120)

Kebudayaan kemiskinan didefinisikan sebagai pola-pola kebudayaan yang membuat orang tetap dalam keadaan miskin. Sekali kebudayaan kemiskinan terjadi, itu akan cenderung ada terus-menerus yang diturunkan kepada keturunannya. Para anak-anak mereka menyerap sikap dasar dan nilai-nilai yang sudah tertanam tersebut sehingga secara psikologi tidak siap untuk mengambil kesempatan yang mungkin bisa dikembangkan dalam hidup mereka dan tingkat kepekaan dalam menangkap peluang, wawasan, etos kerja, keadaban, dan sebagainya menjadi rendah. Lewis mengatakan bahwa kemiskinan dipertahankan

karena adanya kebudayaan kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa menurut Lewis, kemiskinan merupakan kebudayaan atau sebuah cara hidup yang pada dasarnya diperoleh melalui proses belajar dan sifatnya selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya. Artinya, ada suatu setting sosio-historis tertentu dari realitas masyarakat tersebut yang kemudian mengkonstruksi pola atau cara hidup sebuah komunitas menjadi berkebudayaan kemiskinan.

Dalam penjelasan kebudayaan kemiskinan Lewis kurang menjelaskan soal penyebab kemiskinan, tetapi dia menerima penjelasan kemiskinan struktural untuk menjelaskan penyebab-penyebab kemiskinan dan pembentukan kesenjangan antara yang miskin dan yang berada. Masyarakat mengembangkan bentuk budaya, bahasa, sistem kepercayaan, dan institusi lokal yang mereka teruskan kepada anak-anak mereka.

Lewis accepts structural explanation, for the causes of poverty and the establishment of the gap between the poor and the well-off. He goes on to state, however, that in learning to adapt to their poverty—that is, in coping with deprivation—people develop cultural forms, language, belief system, and local institutions that they pass on to their children.<sup>8</sup>

Dengan demikian, teori Lewis kurang efektif dalam menganalisa kemiskinan yang terjadi di Jepang. Oleh karena itu, studi ini menggunakan teori kemiskinan struktural sehingga bertumpu pada asumsi dasar bahwa kemiskinan yang terjadi di Jepang merupakan kemiskinan struktural. Berdasarkan teori kemiskinan struktural yang dikemukakan oleh Blank (1997) dan Quigley (2003) yang dikutip oleh William Kornblum dalam bukunya yang berjudul *Social Problems : Poverty Amid Affluence* (1992: 239), kemiskinan bagi kelompok tertentu dipahami sebagai lemahnya peran struktural dalam masyarakat yang tidak memberi ruang dan akses bagi kaum miskin. Di sini orang miskin dilihat sebagai korban pasif (*passive victim*) dari kelalaian struktural. Teori ini tidak melihat individu sebagai sumber kemiskinan, tetapi pada sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menyebabkan

---

<sup>8</sup> William Kornblum, dan Joseph Julian, *Social Problems : Poverty Amid Affluence* (USA: A Simon & Schuster Company: 1992), hlm. 239.

terbatasnya kesempatan dan sumber penghasilan untuk kehidupan. *Blank* (1997) dan *Quigley* (2003) mengatakan

Fringe benefits including health care and promotions have also become scarce for low skilled workers. These and related economic changes documented by *Blank* (1997) and *Quigley* (2003) show the way the system has created increasingly difficult problems for those who want to work.<sup>9</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kemiskinan disebabkan oleh sistem atau struktur yang menimbulkan masalah bagi mereka yang menginginkan pekerjaan, seperti gaji minimum yang tidak cukup, sulitnya memperoleh pekerjaan yang lebih baik karena jumlah pekerjaan yang terbatas, dan kurangnya pertumbuhan di sektor yang mendukung pekerjaan dengan *skill* rendah, sehingga mereka semakin terbelakang dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah, termasuk para buruh harian, keluarga *single mother*, *working poor*, dan para pengangguran yang berpotensi untuk mengalami *homeless*.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang bukan disebabkan oleh rajin tidak rajinnya individu bekerja, dan bukan juga berasal dari kebudayaan kemiskinan, melainkan disebabkan oleh adanya sistem atau struktur yang mencegah sebagian besar orang untuk menjadi kuat, sejahtera, bahkan kaya. Sekuat apa pun seseorang bekerja, dia tidak bisa meningkatkan taraf hidupnya karena struktur mencegah dia untuk berkembang. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan.<sup>10</sup> Kemiskinan ini umumnya ditandai dengan ketimpangan atau kesenjangan, antara lain kepemilikan sumber daya, kesempatan berusaha,

---

<sup>9</sup>R. M.Blank. Selecting Among Anti-Poverty Policies: Can an Economics Be both Critical and Caring? (*Review of Social Economy*, 2003), hlm. 61(4), 447-471.

Jencks, C. Can we replace welfare with work? In M. R. Darby (Ed.), *Reducing Poverty in America* (Thousand Oaks: Sage, 1996), hlm. 69-81.

<sup>10</sup> Kemiskinan ini disebabkan oleh tatanan kelembagaan. Kelembagaan adalah pengertian yang paling luas yang tidak hanya mencakup tatanan organisasi, tetapi juga aturan-aturan main yang diterapkan.

keterampilan, dan faktor lain yang menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan mengakibatkan struktur sosial yang timpang. Kemiskinan struktural umumnya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang.<sup>11</sup>

Struktur memiliki beberapa pengertian, yaitu: (1) cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan; (2) yang disusun dengan pola tertentu; (3) pengaturan unsur atau bagian suatu benda; (4) ketentuan unsur-unsur dari suatu benda.<sup>12</sup> Jadi, struktur sosial memiliki pengertian konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Struktural berarti berkenaan dengan struktur, sehingga kemiskinan struktural dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh struktur yang dalam penelitian ini berkaitan dengan struktur ekonomi dan non ekonomi atau pengaturan dalam ekonomi dan non ekonomi.

Teori kemiskinan struktural juga didukung oleh *Kuroki Toshikatsu*, kepala Seksi Bantuan Sosial Jepang yang menganalisis bahwa penyebab kemiskinan di Jepang pada tahun 1950-an adalah ‘kemiskinan struktural’ (*kōzōjyō no hinkon* • 構造上の貧困). Beliau mengatakan, rendahnya penghasilan buruh harian, meningkatnya angka pengangguran, dan berkurangnya kesempatan kerja bagi orang yang sudah tua disebabkan oleh struktur ekonomi. Kuroki juga menyatakan bahwa kemiskinan di Jepang juga terjadi akibat kurangnya jaminan keamanan sosial.<sup>13</sup>

Kemiskinan secara substansial memiliki banyak tingkatan dan macam-macam ciri orang miskin, sehingga tidak semua orang miskin dapat diartikan dan digeneralisir memiliki kebudayaan kemiskinan maupun kemiskinan struktural. Studi ini akan menganalisa penyebab terjadinya *homeless* di Jepang sebagai suatu bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh kemiskinan struktural dengan melihat

---

<sup>11</sup>Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah-Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* (Jakarta-Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hlm.168.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga tahun 2005, hlm. 1092

<sup>13</sup> Deborah, J Milly. *Poverty, Equality, and Growth: The Politics of Economic Need in Postwar Japan*. (USA, 1999), hlm.218-219.

beberapa kenyataan bahwa munculnya *homeless* disebabkan oleh adanya perubahan struktural khususnya dalam perekonomian Jepang. Munculnya masalah *homeless* sebagai masalah sosial Jepang kontemporer dipengaruhi oleh berkurangnya kesempatan kerja bagi para pekerja non-skill akibat perubahan struktur industri sekunder (konstruksi dan manufaktur), terjadinya banyak pengangguran dan meningkatnya jumlah pekerja non reguler (pekerja *part time*, pekerja temporer, dan buruh harian) akibat terjadinya restrukturisasi dalam perusahaan Jepang. Selain itu, terdapat pula faktor non ekonomis yang memperburuk keadaan *homeless*, yaitu ketidakefektifan jaringan keamanan sosial dan kebijakan dalam memperoleh perumahan.

Dilihat dari faktor-faktor penyebabnya yang telah dikemukakan, tampak bahwa kemiskinan berhubungan dengan kondisi awal yang tidak menguntungkan. Ini mengakibatkan ketidakseimbangan (dualisme miskin-kaya) dan akan makin memperparah kemiskinan itu sendiri. Dari sini kiranya tepat untuk mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan relatif mengingat dualisme tersebut dan tata nilai dalam masyarakat yang berkembang dinamis dan multi dimensi.<sup>14</sup> Kemiskinan di Jepang di lihat dari sudut pandang Amerika sebagai indikator karena jika dibandingkan Indonesia atau negara sedang berkembang lainnya, Jepang tidak bisa disebut mengalami kemiskinan.

Pendekatan teoritis yang digunakan untuk menganalisa *homeless* di Jepang adalah pendekatan sosiologis yang menganalisa faktor ekonomi dan non ekonomi. Kedua faktor ini harus sejalan karena saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Demikianlah skripsi ini akan menggambarkan dan menjelaskan masalah *homeless* dalam masyarakat Jepang sebagai suatu masalah sosial Jepang kontemporer yang diakibatkan oleh kemiskinan struktural<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>*ibid.*, 169

<sup>15</sup>Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga yang sepakat bahwa suatu usaha bersama diperlukan untuk mengubah kondisi itu. (William Kornblum dan Joseph Julian, *Social Problems (USA: A Simon & Schuster Company: 1992)*, hlm.3.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Skripsi ini memiliki tujuan penelitian deskriptif, eksplanatif, dan analitis, yaitu memberikan gambaran dan penjelasan serta analisa mengenai masalah *homeless* sebagai salah satu bentuk kemiskinan struktural yang dikaji secara sosiologis, sehingga memperdalam pengetahuan dan wawasan kita terhadap masalah sosial ekonomi yang sedang dihadapi Jepang saat ini. Mengingat Jepang merupakan negara perekonomian terbesar kedua di dunia setelah AS, studi tentang masalah yang timbul setelah merasakan kejayaan perekonomian sangat diperlukan, terutama dampak yang timbul dalam masyarakatnya.

### 1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur dengan menggunakan sumber data sekunder melalui berbagai sumber kepustakaan berupa bahan-bahan bacaan dari perpustakaan FIB, perpustakaan PSJ, Perpustakaan FISIP, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Japan Foundation (JF) Jakarta, Perpustakaan Kokusai Kouryuukikin Kansai Center- Japan Foundation Kansai Jepang, Perpustakaan Pusat Osaka, bahan kuliah, dan koleksi-koleksi pribadi. Selain itu, ada juga bahan dari *searching* internet.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat Bab, yaitu:

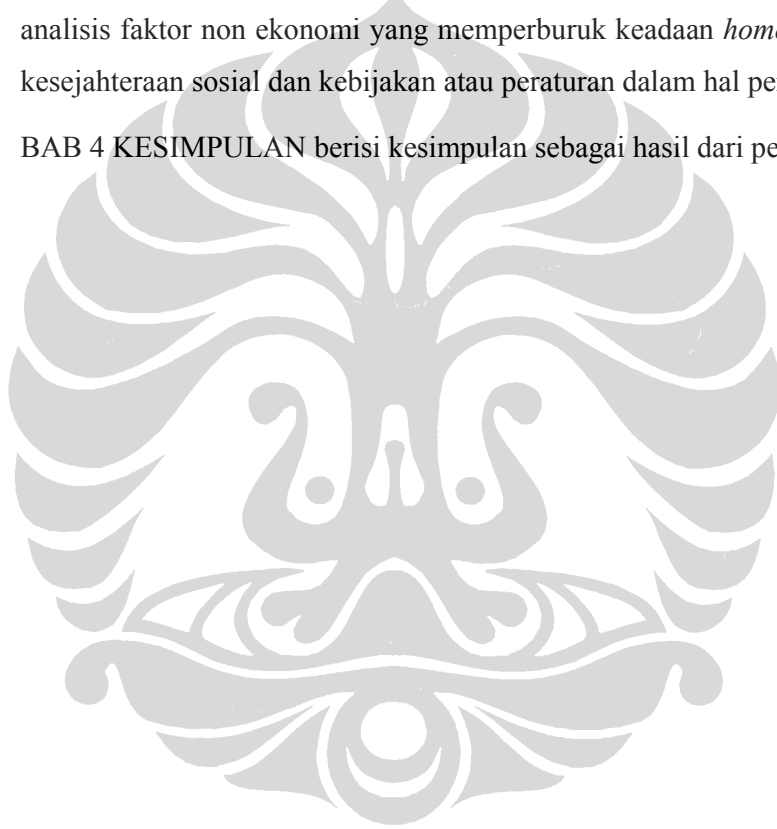
BAB 1 PENDAHULUAN berisi Latar Belakang Masalah, Masalah Penelitian, Batasan Penelitian, Kerangka Teoritis, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 KEMISKINAN STRUKTURAL SEBAGAI AKIBAT DARI STRUKTUR EKONOMI JEPANG KONTEMPORER berisi penjelasan mengenai keadaan struktur industri dan struktur tenaga kerja dalam perusahaan Jepang yang mengakibatkan timbulnya kemiskinan struktural. Bagian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang konkrit mengenai struktur yang dimaksud dan

menghubungkannya dengan Kemiskinan Struktural sebagai landasan teori yang dipakai dalam menganalisa kemiskinan di Jepang.

BAB 3 ANALISIS *HOMELESS* SEBAGAI SUATU BENTUK KEMISKINAN STRUKTURAL berisi salah satu bentuk kemiskinan struktural, yaitu *homeless*, yang terdiri dari bagian definisi dan konsep *homeless*, latar belakang historis, karakteristik *homeless* di Jepang, jenis-jenis *homeless*, analisis *homeless* sebagai dampak kemiskinan struktural (*homeless* yang berasal dari kaum buruh harian di *yoseba* dan *homeless* yang berasal dari pekerja reguler dan non reguler), dan analisis faktor non ekonomi yang memperburuk keadaan *homeless*, seperti sistem kesejahteraan sosial dan kebijakan atau peraturan dalam hal perumahan.

BAB 4 KESIMPULAN berisi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian skripsi.





**BAB 2**  
**KEMISKINAN STRUKTURAL SEBAGAI AKIBAT DARI**  
**STRUKTUR EKONOMI JEPANG KONTEMPORER**

Setiap negara memiliki struktur yang mengatur setiap aspek kehidupan masyarakatnya baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya dan struktur tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Struktur ekonomi merupakan salah satu struktur yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial. Berikut ini terdapat dua struktur ekonomi di Jepang yang dianggap sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya, yaitu struktur industri dan struktur tenaga kerja dalam perusahaan. Struktur industri dapat diartikan sebagai konsep perumusan asas hubungan antar individu (pekerja) dalam suatu pola susunan industri yang mengatur setiap pekerjaannya. Begitu pula dengan struktur perusahaan dapat diartikan sebagai konsep perumusan asas hubungan antar pegawai dalam suatu perusahaan yang merupakan pedoman bagi setiap pegawainya.



## 2.1 Struktur Industri (*Sangyô Kôzô* • 産業構造)

Industri Jepang dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu industri primer (*daiichijisangyô* • 第一次産業) yang terdiri dari sektor agrikultur, kehutanan, dan perikanan; industri sekunder (*dainijisangyô* • 第二次産業) terdiri dari sektor manufaktur (*seisan* • 生産),<sup>16</sup> konstruksi (*kensetsugyô* • 建設業), dan pertambangan; dan industri tersier (*daisanjisangyô* • 第三次産業) terdiri dari sektor jasa<sup>17, 18</sup>.

Pecahnya gelembung ekonomi Jepang pada awal tahun 1990-an yang diikuti oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan serta globalisasi ekonomi telah mempengaruhi struktur jumlah industri dan kesempatan kerja dalam industri Jepang. Akibat iklim perekonomian yang buruk serta tuntutan kompetisi ekonomi dalam dunia global, industri telah mengurangi jumlah industri sekunder dan menaikkan jumlah industri tersier. Berikut ini merupakan data rasio struktur industri primer, sekunder dan tersier di Jepang.

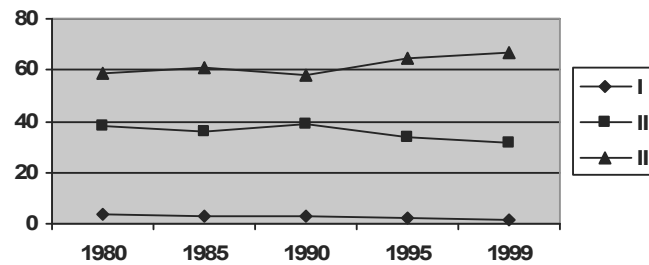
**Tabel 1 Rasio struktur industri**

Tahun	Rasio Struktur Industri (%)		
	Jenis Industri Primer	Sekunder	Tersier
1980	3,6	37,8	58,7
1985	3,1	36,3	60,7
1990	2,6	39,0	58,3
1995	2,0	33,5	64,5
1999	1,6	31,4	67,0

<sup>16</sup> Industri berat (besi dan baja) dan kimia, produk pangan, tekstil, dan rupa-rupa (pulp dan kertas, minyak, karet, keramik, industri kayu, dan perabotan rumah tangga). Industri manufaktur lahir di Jepang sejak tahun 1905.

<sup>17</sup> Sektor jasa meliputi transportasi, komunikasi, usaha eceran, grosir, perbankan, keuangan, real estate (harta tidak bergerak), jasa administrasi.

<sup>18</sup>Ito Takatoshi, *The Japanese Economy* (London, 1993), hlm.23 dan biro statistik Jepang tahun 2002, hlm.295



**Grafik 1 Rasio struktur industri**

Keterangan : —◆— I sektor agrikultur, kehutanan, dan perikanan (industri primer)  
 —■— II sektor manufaktur (industri sekunder)  
 —▲— III sektor jasa (industri tersier)

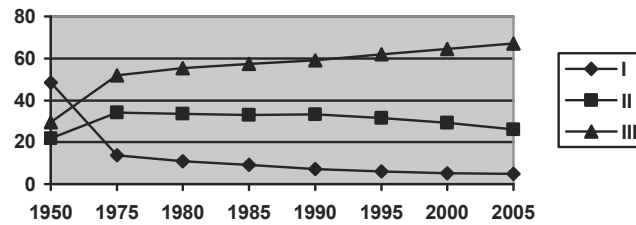
SUMBER : Laporan Biro Statistik Jepang tahun 2002

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah industri sekunder mengalami penurunan sejak awal tahun 1990-an, yaitu 39,0% pada tahun 1990 menjadi 33,5% pada tahun 1995, begitu pula pada tahun 1999 semakin menurun lagi menjadi 31,4%. Sementara itu, jumlah industri jasa semakin meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai 67% pada tahun 1999.

Menurunnya sektor industri sekunder merupakan transformasi struktur industri yang mempengaruhi jumlah kesempatan kerja. Berikut ini terdapat perubahan kesempatan kerja pada sektor sekunder sejak masa pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga tahun 2005.

**Tabel 2 Rasio jumlah pekerja berdasarkan struktur industri**

Tahun	Rasio Jumlah Pekerja (%)			
	Jenis Industri	Primer	Sekunder	Tersier
1975		13,8	34,1	51,8
1980		10,9	33,6	55,4
1985		9,3	33,1	57,3
1990		7,1	33,3	59,0
1995		6,0	31,6	61,8
2000		5,1	29,2	64,5
2005		4,8	26,1	67,2



**Grafik 2 Rasio jumlah pekerja berdasarkan struktur industri**

Keterangan: —◆— I sektor agrikultur, kehutanan, dan perikanan (industri primer)  
 —■— II sektor manufaktur (industri sekunder)  
 —▲— III sektor jasa (industri tersier)

SUMBER: Laporan Biro Statistik Jepang, Kantor Kabinet tahun 2006

Dari data di atas dapat diketahui bahwa seiring dengan semakin menurunnya jumlah industri sekunder, kesempatan kerja dalam industri ini pun semakin berkurang. Sejak tahun 1970 hingga tahun 2005, jumlah kesempatan kerja dalam industri sekunder terus mengalami penurunan. Berkurangnya kesempatan kerja dalam industri sekunder tentu saja mempengaruhi kesejahteraan hidup setiap pekerjaannya baik pekerja reguler maupun pekerja non reguler.

Industri Jepang memiliki sebuah sistem industri yang disebut dengan sistem *keiretsu*. Keiretsu merupakan gabungan industri-industri besar yang memiliki hubungan horizontal dengan sesama industri besar dan memiliki hubungan vertikal dengan perusahaan-perusahaan di bawahnya, yaitu perusahaan kontraktor, subkontraktor, dan sub-subkontraktor. Secara horizontal, *keiretsu* ini didominasi oleh industri sekunder, yaitu manufaktur dan konstruksi.<sup>19</sup> Dalam struktur industri ini, golongan pekerja yang berada pada posisi paling bawah adalah kaum buruh harian (*hiyatoirôdôsha* • 日雇労働者). Selain itu, secara struktural golongan buruh harian memiliki gaji yang paling rendah. Hal ini berarti bahwa struktur industri ini menempatkan kaum buruh harian sebagai golongan yang termarginalisasi.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Kotaro, Tsuru. *The Japanese Market Economy System: Its Strengths and Weaknesses : The Changing Production Keiretsu and Distribution System-the Vertical Interfirm Relationship* (Tokyo: Kondansha, 1995), hlm. 67-68

<sup>20</sup> Tom, Gill, *Men of Uncertainty-The Social Organization of Day Laborers in*

## 2.2 Struktur Tenaga Kerja dalam Perusahaan

Struktur tenaga kerja dalam perusahaan Jepang mengalami perubahan setelah dilakukannya tindakan *risutora*. *Risutora* berasal dari bahasa Inggris ‘*restructuring*’ yang berarti reorganisasi aktivitas perusahaan atau bisnis. Jepang menggunakan istilah ‘*risutora*’ yang berarti pengurangan tenaga kerja, baik melalui pemberhentian tenaga kerja maupun peningkatan jumlah tenaga kerja non reguler (*hiseishain* • 非正社員). Perusahaan melakukan tindakan *risutora* karena kondisi perusahaan mengalami kemerosotan akibat berkurangnya permintaan konsumsi dan investasi, khususnya setelah terjadinya resesi ekonomi yang berkepanjangan akibat pecahnya gelembung ekonomi Jepang pada awal tahun 1990-an. Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1990-an telah menyebabkan bank-bank tidak dapat lagi menyediakan bantuan dana dan melindungi perusahaan dari krisis keuangan dan bahkan banyak bank yang sedang berada di ujung kebangkrutan. Perusahaan dan pabrik juga banyak yang ditutup<sup>21</sup> atau dipindahkan ke luar negeri untuk mendapatkan tenaga kerja dan bahan mentah yang murah.

Menurut teori ekonomi, latar belakang yang paling penting dan berpengaruh terhadap pelaksanaan *risutora* dalam perusahaan Jepang adalah teori ekonomi neo-klasikal<sup>22</sup> yang tergantung pada hipotesis bahwa terdapat sebuah kompetisi sempurna dalam pasar ekonomi, dan setiap orang mengambil keputusan yang sesuai dengan akal sendiri (rasionalitas). Hipotesis tersebut membawa ke dalam kecenderungan globalisasi, perubahan dari ‘sistem kerja seumur hidup (*shūshinkoyō*)’ dan ‘sistem gaji berdasarkan senioritas (*nenkojoretsu*)’ menjadi ‘sistem berdasarkan kemampuan kerja,’ dan perubahan dari pekerja ‘reguler (pekerja tetap)’ menjadi pekerja ‘non reguler (pekerja tidak tetap)’ dan bahkan ‘pemecatan.’ Hal inilah yang dialami oleh perusahaan Jepang, yaitu suatu

---

*Contemporary Japan* (State University of New York, 2001), hlm.152.

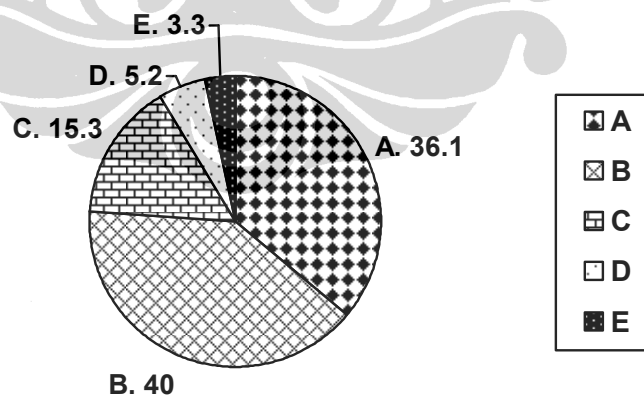
<sup>21</sup> Perusahaan-perusahaan yang juga telah mengalami kebangkrutan adalah Bank Hokkaido Takushoku (1997), Yamaichi Securities (1997), Bank Kredit Jangka Panjang (1998), dan Bank Kredit Nippon (1998)

<sup>22</sup> Selain teori ekonomi neo-klasikal, ada beberapa teori ekonomi lain, seperti teori ekonomi liberal, teori ekonomi keynesian, teori moneter, dan lain-lain

tindakan *'risutora'* dan sistem gaji berdasarkan kemampuan atau penampilan kerja.<sup>23</sup>

Krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pecahnya gelembung ekonomi Jepang telah menyebabkan terjadinya transformasi struktural dalam perusahaan Jepang, yaitu luntarnya sistem kepegawaian jangka panjang (*shûshinkoyô*) dan diikuti dengan perubahan sistem gaji berdasarkan senioritas (*nenkojoretsu*) menjadi sistem gaji berdasarkan kemampuan kerja (*nôryoku*). Sistem *shûshinkoyô* atau sistem kepegawaian jangka panjang adalah sebuah sistem yang memberikan kesempatan bagi seorang pegawai untuk tetap bekerja dalam sebuah perusahaan mulai dari sejak masuk sampai pensiun. Sistem *nenkojoretsu* adalah sistem pemberian gaji berdasarkan senioritas dan masa pengabdian seorang pegawai pada sebuah perusahaan. Kedua keunikan manajemen perusahaan Jepang yang selama ini terpelihara telah mengalami kelunturan, sehingga merubah struktur pekerja dalam perusahaan Jepang.

Berikut ini adalah grafik pandangan perusahaan terhadap sistem *shûshinkoyô* berdasarkan hasil survei terhadap perusahaan yang diadakan oleh Lembaga Tenaga Kerja Jepang pada tahun 2003.



Grafik 3 Pandangan perusahaan terhadap sistem *shûshinkoyô* (%)

<sup>23</sup> Kazuo, Kikuno. 2003. *The new look of Japanese restructuring ("Restr")*. 21 世紀社会デザイン研究. No.2

- Keterangan: A. Akan mempertahankan sistem *shûshinkoyô* (36,1%)  
 B. Penyesuaian secara parsial tidak dapat dihindari (40%)  
 C. Perlu review secara fundamental (15,3%)  
 D. Tidak mempraktekkan sistem *shûshinkoyô* (5,2%)  
 E. Tidak tahu/tidak menjawab (3,3%)

SUMBER: "Survey on Corporate Human Resources Strategies and Workers Attitude towards Work," (Survei Perusahaan) tahun 2003, Lembaga Tenaga Kerja Jepang

Melalui data pada grafik 3, dapat diketahui bahwa sistem *shûshinkoyô* telah mulai runtuh dan hanya 36,1% perusahaan yang akan tetap mempertahankan sistem tersebut. Meskipun persentase perusahaan yang tidak mempraktekkan sistem *shûshinkoyô* hanya 5,2%, tetapi 40% perusahaan lainnya melakukan penyesuaian dengan mulai mengurangi penerapan sistem tersebut secara berangsur-angsur dan 15,3% perusahaan menganggap perlu review secara fundamental. Hal ini menunjukkan bahwa mengubah sistem *shûshinkoyô* memang tidak semudah membalikkan telapak tangan karena sistem tersebut telah lama menjadi budaya korporasi perusahaan Jepang atau manajemen ala Jepang. Akan tetapi, perusahaan secara perlahan-lahan telah mulai melunturkan penerapan sistem tersebut melalui tindakan *risutora* dengan memperbanyak jumlah pekerja non reguler.

Dalam menghadapi krisis ekonomi dan kesukaran dalam keuangan, perusahaan menerapkan biaya produksi rendah dengan lebih banyak mempekerjakan pekerja non reguler, yaitu para pekerja yang statusnya adalah pegawai tidak tetap dan tidak terikat dalam perusahaan. Alasan perusahaan melakukan hal ini adalah karena pekerja non reguler digaji dengan gaji yang relatif murah, jarang mendapatkan promosi, bantuan<sup>24</sup> dapat diabaikan, tidak diperlukan kontribusi asuransi sosial kepada pemerintah, dan mudah diberhentikan. Selain itu, mempekerjakan pekerja non reguler dapat membantu banyaknya biaya yang telah dikeluarkan untuk menggaji pekerja yang sudah tua karena gaji mereka yang relatif tinggi akibat penerapan sistem *nenkojoretsu*. Ini berarti bahwa yang

---

<sup>24</sup> Bantuan di sini berarti jaminan kerja, jaminan kesehatan, maupun jaminan masa tua.

membedakan antara pekerja reguler dengan non reguler adalah perolehan keamanan sosial, jaminan kerja, dan gaji yang lebih baik. Pada saat ini jumlah pekerja non reguler semakin meningkat di Jepang.<sup>25</sup> Berikut ini adalah data jumlah pekerja reguler dan non reguler di Jepang dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2001.

Tabel 3 Jumlah pekerja reguler dan pekerja non reguler di perusahaan Jepang

Tahun	Total Tenaga kerja (orang)	Pekerja reguler (%)	Pekerja non reguler (%)			
			<i>paato</i>	<i>arubaito</i>	<i>Pekerja temporer</i>	Total
1985	39.990.000	83,6	9,0	3,5	3,9	16,4
1990	43.690.000	79,8	11,6	4,7	3,9	20,2
1995	47.800.000	79,1	11,8	5,5	3,7	21,0
1997	49.630.000	76,8	12,9	6,2	4,2	23,3
1998	49.670.000	76,4	13,2	6,6	3,8	23,6
1999	49.130.000	75,1	14,0	6,9	4,1	25,0
2000	49.030.000	74,0	14,7	7,3	4,0	26,0
2001	49.900.000	72,0	15,4	7,6	4,2	27,2

Catatan :

1. Persentase tenaga kerja tahun 1985 (47,7%), tahun 1990 (48,4), tahun 1995 (49,1), tahun 2000 (48,2%), dan tahun 2005 47,5%)
2. Pekerja non reguler terdiri dari pekerja *part time* atau pekerja paruh waktu (*paato* • *arubaito*) dan pekerja temporer (*rinji* • *haken* • *keiyaku* • *hiyatoi*). *Paato* dan *arubaito* merupakan pekerja *part time* atau paruh waktu yang bekerja dengan lama waktu bekerja lebih sedikit dari pada pekerja reguler. Pekerja *paato* mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga dan pekerja *arubaito* mayoritas adalah mahasiswa. Pekerja temporer (*shokutaku* • 嘱託) memiliki beberapa variasi jenis kerja, seperti pekerja *rinji* atau *rinjihiyatoi* atau *hiyatoi* (buruh harian yang bekerja kurang dari 30 hari), *keiyaku* (pekerja yang memiliki keahlian khusus dan dikontrak oleh perusahaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan), dan pekerja *haken* • 派遣, yaitu pekerja yang diutus oleh suatu agensi untuk bekerja di suatu perusahaan.

SUMBER: Laporan Biro Statistik Jepang tahun 2002

<sup>25</sup> Jeff, Kingston. 2004. *Japan's Quiet Transformation Social Change and Civil Society in the Twenty-first Century : Social Transformations- Family, gender, aging, and work* (London and New York: Routledge Curzon Taylor and Francis Group), hlm.286-287.

Data pada tabel 3 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah pekerja reguler dan peningkatan jumlah pekerja non reguler dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2001. Berdasarkan data statistik Ketenagakerjaan OECD melalui Laporan biro statistik Jepang tahun 2008, jumlah pekerja non reguler tetap banyak meskipun sedikit berkurang menjadi 24,5% pada tahun 2006.

Perusahaan Jepang telah melakukan *risutora* dengan alasan efisiensi dan efektifitas kerja perusahaan. Perusahaan tidak sanggup lagi memberikan gaji dan benefit seperti sebelum terjadi krisis, sehingga mereka memperbanyak jumlah pekerja non reguler. Memiliki status sebagai pekerja non reguler berarti mereka harus siap untuk diberhentikan suatu saat nanti. Dengan kata lain, para pekerja non reguler memang rentan mengalami pengangguran. Selain itu, terdapat pula usaha pemberhentian kerja bagi para pekerja yang sudah tua karena dianggap sudah tidak produktif lagi. Jadi, makna *restructuring* bukanlah untuk kepentingan tenaga kerja tetapi untuk manajemen dan pasar kompetisi, sehingga dari sudut pandang tenaga kerja, makna *restructuring* sebenarnya adalah *disutora* yang juga berasal dari bahasa Inggris, *destruction* yang berarti pengurangan tenaga kerja.

Akibat resesi ekonomi, restrukturisasi perusahaan Jepang juga mengakibatkan terjadinya kebangkrutan. Berikut ini adalah data jumlah perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan jumlah pegawai yang berasal dari perusahaan yang mengalami kebangkrutan tersebut.



**Grafik 4 Jumlah perusahaan dan pegawai yang mengalami kebangkrutan**

SUMBER: Teikoku Databank Ltd., "Japan's Business Failure."



Data pada grafik 4 menunjukkan bahwa sejak awal tahun 1990-an, seiring dengan stagnasi ekonomi atau krisis ekonomi yang berkepanjangan di Jepang, jumlah perusahaan yang mengalami kebangkrutan semakin meningkat. Sekalipun jumlahnya menurun pada tahun 1998, tetapi pada tahun berikutnya meningkat kembali.

Terjadinya restrukturisasi telah mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran telah menjadi barometer terhadap masalah ekonomi Jepang. Berikut ini adalah data angka pengangguran di Jepang.

**Tabel 4 Angka pengangguran dari tahun 1990-2006**

1990	1995	2000	2002	2003	2004	2005	2006
2,1	3,2	4,7	5,3	5,4	4,7	4,4	4,1

SUMBER: Biro Statistik Jepang tahun 2007 Suvei Ketenagakerjaan tahun 2006)

Angka pengangguran pada tahun 2003 mencapai 5,4% dan merupakan yang terburuk sepanjang sejarah. Keadaan ini sangat memprihatinkan, khususnya bagi para lansia dan pekerja non reguler yang tentu saja rentan mengalami pengangguran.

### 2.3 Kemiskinan Struktural<sup>26</sup>

Kemiskinan merupakan masalah yang rumit, khususnya dari segi faktor penyebabnya. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian kerangka teori, kemiskinan struktural adalah kemiskinan disebabkan oleh sistem atau struktur yang menimbulkan masalah bagi mereka yang menginginkan pekerjaan, seperti gaji minimum yang tidak cukup, sulitnya memperoleh pekerjaan yang lebih baik karena jumlah pekerjaan yang terbatas, dan kurangnya pertumbuhan di sektor yang mendukung pekerjaan dengan *skill* rendah, sehingga mereka semakin terbelakang dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja non reguler, seperti buruh harian, pekerja *part time*, dan lain-lain.

<sup>26</sup> Lihat Bab 1 bagian Kerangka Teori, hlm.5 skripsi ini.

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan.<sup>27</sup> Kemiskinan ini umumnya ditandai dengan ketimpangan atau kesenjangan, antara lain kepemilikan sumber daya, kesempatan berusaha, keterampilan, dan faktor lain yang menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan mengakibatkan struktur sosial yang timpang. Kemiskinan struktural umumnya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang.<sup>28</sup> Hal inilah yang dialami oleh Jepang setelah mengalami krisis ekonomi akibat pecahnya gelembung ekonomi pada awal tahun 1990-an. Resesi ekonomi telah memaksa Jepang untuk melakukan perubahan struktur dalam perusahaan. Jadi, teori kemiskinan struktural yang dikemukakan oleh *Blank* (1997) dan *Quigley* (2003) ini juga mampu menganalisa penyebab kemiskinan di Jepang.

Analisis kemiskinan struktural juga dipakai oleh Kuroki Toshikatsu, kepala Seksi Bantuan Sosial Jepang yang menganalisa bahwa penyebab kemiskinan di Jepang pada tahun 1950-an adalah ‘kemiskinan struktural’ (*kôzôjyô no hinkon* • 構造上の貧困). Beliau mengatakan, rendahnya penghasilan buruh harian, meningkatnya angka pengangguran, dan berkurangnya kesempatan kerja bagi orang yang sudah tua disebabkan oleh struktur ekonomi. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh sistem kesejahteraan sosial yang tidak berjalan dengan baik.<sup>29</sup> Analisis penyebab kemiskinan struktural yang dikemukakan oleh Kuroki Toshikatsu ini masih relevan untuk menganalisa kondisi kemiskinan di Jepang saat ini.

---

<sup>27</sup> Kemiskinan ini disebabkan oleh tatanan kelembagaan. Kelembagaan adalah pengertian yang paling luas yang tidak hanya mencakup tatanan organisasi, tetapi juga aturan-aturan main yang diterapkan.

<sup>28</sup> Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah-Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* (Jakarta-Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hlm.168

<sup>29</sup> Deborah, J Milly. *Poverty, Equality, and Growth: The Politics of Economic Need in Postwar Japan*. (USA, 1999), hlm.218-219

Struktur ekonomi, seperti struktur industri dan struktur tenaga kerja dalam perusahaan Jepang memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan para tenaga kerja. Kondisi struktur industri telah menempatkan para buruh harian menjadi golongan yang termarginalisasi dan memiliki status pekerjaan yang tidak stabil, terutama ketika menghadapi masalah kesempatan kerja yang semakin berkurang dalam industri sekunder. Selain itu, perubahan struktur tenaga kerja melalui *risutora* dalam perusahaan Jepang juga telah menyebabkan semakin banyaknya orang yang memiliki pekerjaan yang tidak stabil karena perusahaan memperbanyak jumlah pekerja non reguler. Bahkan, oleh karena stagnasi ekonomi selama dua dekade terakhir ini, para pekerja reguler juga tidak luput dari pemberhentian kerja sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat. Terjadinya perubahan struktur ekonomi, khususnya dalam perusahaan Jepang tentu memiliki dampak sosial yang mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakatnya. Struktur ekonomi yang berjalan seperti ini telah membentuk kemiskinan di Jepang, seperti *working poor* (masih tetap miskin meskipun bekerja), pengangguran, *netto kafe nanmin* (orang yang tidur di internet kafe karena tidak sanggup menyewa apartemen, umumnya merupakan kalangan anak muda), *homeless*, dan lain-lain.

Munculnya *homeless* sebagai salah satu kasus kemiskinan di Jepang merupakan dampak dari perubahan struktur ekonomi. Oleh karena itu, *homeless* di Jepang merupakan suatu bentuk kemiskinan struktural. Bersandar pada asumsi ini, *homeless* di Jepang akan dianalisa lebih jauh pada bagian analisis bab 3.



**BAB 3**  
**ANALISIS *HOMELESS* SEBAGAI SUATU BENTUK KEMISKINAN**  
**STRUKTURAL**

### 3.1 Definisi dan Konsep *Homeless*

Istilah *hômuresu*<sup>30</sup> berasal dari bahasa Inggris, yaitu *homeless*, yang artinya tidak memiliki rumah,<sup>31</sup> atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman yang tetap. Dalam bahasa Jepang, istilah umum untuk menyebut kaum *homeless* adalah *furôsha*・浮浪者<sup>32</sup> yang berarti gelandangan atau tunawisma, tetapi sebenarnya secara tidak langsung memiliki makna ‘kehilangan keluarga dan relasi sosial’. Istilah ini kurang tepat untuk menyatakan istilah ‘*homeless*’ kecuali dalam hal ‘gelandangan.’ Sementara itu, pada zaman *Tokugawa*, istilah yang digunakan

<sup>30</sup> 家のない人- *ie no nai hito*.

<sup>31</sup> *Having no home* (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2006).

<sup>32</sup> Dilihat dari kanji yang membentuknya dapat diartikan sebagai reruntuhan muatan kapal karam yang terapung-apung di laut. Menggambarkan kondisi para *homeless* yang hidup tanpa tujuan atau ‘berkelana’ di luar lingkungan masyarakat dan dianggap sebagai orang terbuang.

untuk menyebut *homeless* adalah *yadonashi* • 宿無し, dan *mushuku* • 無宿<sup>33</sup> yang secara harfiah kedua istilah tersebut memiliki arti ‘tidak memiliki rumah tempat tinggal’.<sup>34</sup>

Namun, saat ini masyarakat Jepang lebih sering menggunakan istilah serapan *hômuresu* untuk menyebut *homeless*. Pada masa sebelum perang dan sesaat setelah perang, istilah *hômuresu* belum dipakai oleh masyarakat Jepang.<sup>35</sup> Saat itu, istilah yang umum dipakai adalah *furôsha* • 浮浪者.

Istilah *hômuresu* mulai dipublikasikan ke dalam media-media Jepang pada awal tahun 1990-an oleh dua perusahaan media terbesar di Jepang, yaitu *Yomiuri* dan *Asahi Groups*. Istilah *hômuresu* telah menjadi suatu isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan karena Jepang sedang mengalami stagnasi ekonomi. Pada saat itu artikel-artikel tentang *homeless* semakin banyak sehingga perlu dibuat suatu istilah yang memberikan gambaran mengenai persepsi publik tentang *homeless*. Sebelum menggunakan istilah *hômuresu*, istilah umum yang digunakan dalam media Jepang adalah *furôsha* • 浮浪者. Pada tahun 1960 sampai awal tahun 1990, keberadaan para *homeless* di Jepang tidak tampak ke permukaan dan cenderung diabaikan eksistensinya. Akan tetapi, setelah tahun 1990 keberadaan *homeless* telah tampak nyata terlihat dalam masyarakat Jepang. Oleh sebab itu, untuk memberikan konotasi<sup>36</sup> yang berbeda, media-media di Jepang mulai menggunakan istilah *hômuresu*.<sup>37</sup>

Selain menggunakan istilah *hômuresu*, ada juga istilah lain yang dipakai oleh masyarakat Jepang untuk menyebutkan kaum *homeless*, yaitu *rojouseikatsusha* •

<sup>33</sup> 住む家のないこと。また、泊まる家のない人。

<sup>34</sup> Tom, Gill, *Men of Uncertainty-The Social Organization of Day Laborers in Contemporary Japan* (State University of New York, 2001), hlm.127.

<sup>35</sup> Masami, Iwata. *Gendai no hinkon-wākingupuā-hômuresu-seikatsuhogo* (Tokyo, 2007), hlm.099.

<sup>36</sup> Tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-3 (Jakarta: 2005), hlm.588.

<sup>37</sup> Tamara Swenson, *Framing Homelessness: Changing Representations in Japanese Media* (Osaka Jogakuin College) <http://jcomm.uoregon.edu/~IAMCR-PolEcon/Swenson.Visgatis.html> (akses 10 Maret 2008)

路上生活 dan *nojukusha*・野宿者. Sebutan *rojouseikatsusha*・路上生活者 biasanya dipakai oleh orang-orang Tokyo dan sebutan *nojukusha*・野宿者 biasanya dipakai oleh orang-orang Osaka. Dilihat dari kata yang membentuknya, *rojouseikatsusha*・路上生活者 berarti orang yang hidup di jalanan, dan *nojukusha*・野宿者 berarti orang yang tidur di lapangan.<sup>38</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada bab pendahuluan bahwa masalah *homeless* merupakan salah satu bentuk kemiskinan. Dalam hal ini, untuk mengetahui *hômuresu* itu merupakan bentuk kemiskinan yang seperti apa, perlu dibuat suatu definisi.

Pada masa sebelum perang, Yokoyama telah membuat definisi *homeless* sebagai berikut:

To the poor people who cannot afford a house, a single tatami mat in a flophouse is a short of home. (Yokoyama 1899: 67, diterjemahkan oleh Gill)

Yokoyama mengatakan bahwa *homeless* di Jepang adalah orang-orang yang tidak mampu memiliki rumah, sehingga mereka menggelar satu tikar tatami sebagai gantinya.

Pada tahun 1987, melalui sebuah konferensi internasional PBB di Jepang yang bertemakan *shinposiumu 'Nihon no Hômaresu'* (シンポジウム「日本のホームレス」), sekelompok penganjur perumahan untuk para *hômuresu* mendefinisikan *homeless* sebagai berikut:

“those who are without stable housing and living in places which cannot be called housing” (Nihon Jûtaku Kaigi 1987)<sup>39</sup>

Artinya, suatu kondisi orang-orang yang tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tinggal di tempat yang tidak layak disebut rumah. (Konferensi Kediaman Penduduk Jepang tahun 1987)

<sup>38</sup> Tooru, Nakayama, *nojukuseikatsusha mondai, jittai to jiritsushien* (Osakafu shiritsudaigaku, shakaifukushigakubu, 2002)

<sup>39</sup> Miki, Hasegawa, *We Are Not Garbage! The Homeless Movement in Tokyo, 1994-2002*. (Routledge New York & London, 2006), hlm.147.

Selain itu, seorang sarjana kesejahteraan yang terkenal bernama Iwata Masami (1995), mendefinisikan *homeless* sebagai berikut:

Homelessness as a condition of extreme poverty characterized by lack of “conventional, regular housing.”<sup>40</sup>

Artinya, suatu kondisi kemiskinan ekstrim yang dicirikan dengan ketidaklaziman tempat tinggal dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Pada tahun 2002, pemerintah Jepang melalui Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh, menetapkan definisi *homeless* sebagai berikut:

都市公園、河川、道路、駅舎、その他の施設を故なく起居の場所とし、非常生活を営んでいる者「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」<sup>41</sup>

Toshi kouen, kasen, douro, ekisha, sonota no shisetsu wo yuenaku, kikyô no basho toshi, hijou seikatsu wo itonandeirusha (hômuresu no jiritsu no shien nado ni kansuru tokubetsu sochihou)

Artinya, orang-orang yang hidup dalam kondisi darurat atau memprihatinkan yang tinggal di taman-taman kota, bantaran sungai, jalanan, sekitar stasiun, dan tempat-tempat umum lainnya (Aturan tindakan khusus menyangkut bantuan untuk membuat para *homeless* bisa hidup mandiri)

Sementara itu, pemerintah Amerika, negara-negara Eropa, termasuk Inggris<sup>42</sup> memiliki definisi yang lebih luas dibanding dengan Jepang. Mereka mendefinisikan *homeless* sebagai orang-orang yang tidak memiliki akomodasi atau tempat tinggal yang layak.<sup>43</sup> Di antara definisi yang ditetapkan oleh pemerintah negara-negara maju (OECD), definisi *homeless* di Jepang memang memiliki interpretasi yang lebih sempit.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Takahiko, Hasegawa. *OECD Shokoku ni okeru Hômaresu no Teigi oyobi Monitaringu ni kansuru Chôsa* (Jepang: 2005), hlm.144.

<sup>42</sup> Undang-Undang Perumahan pasal 175 tahun 1996.

<sup>43</sup> Roger Burrows, Nicholas Pleace dan Deborah Quilgars, *Homelessness and Social Policy* (London and New York: 1997), hlm.7.

Dilihat dari beberapa definisi di atas, masing-masing memiliki kesamaan arti, yaitu tidak memiliki tempat kediaman yang tetap dan layak. Jadi, berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang disebut *hômuresu* jika mereka hidup tanpa memiliki tempat kediaman yang tetap dan layak disebut rumah. Di sinilah letak esensi dari istilah *hômuresu*, yaitu suatu bentuk kemiskinan, terutama dalam hal tempat tinggal sebagai salah satu kebutuhan primer manusia. Karena istilah *hômuresu* diambil dari bahasa Inggris, definisi *homeless* di Jepang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan definisi *homeless* di Barat.

Definisi *homeless*<sup>44</sup> dapat berbeda-beda di tiap-tiap negara karena terikat pada bahasa bahkan kebudayaan. Akan tetapi, definisi-definisi tersebut sesungguhnya memiliki konsep<sup>45</sup> yang sama karena sebuah konsep perlu diambil dari kerangka konsep yang luas untuk dapat memahami kondisi dan ciri-ciri *homeless*. Dalam hal ini, *homeless* memakai konsep ‘kemiskinan’ sebagai konteks masalah karena *homeless* merupakan salah satu bentuk kemiskinan. Perlu adanya variasi konsep *homeless* karena fungsi kritis dari analisis bukanlah menetapkan situasi untuk menentukan kategori-kategori *homeless*, melainkan untuk mengenal proses-proses yang menghubungkan kondisi *homeless* secara historis dan pengaruh serta kaitannya terhadap yang lain, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.

Bersandar pada konsep kemiskinan sebagai kerangka konsep yang dipakai dalam memahami *homeless*, ada dua konsep yang esensial dalam kerangka konsep tersebut, yaitu pertama adalah konsep kemiskinan ekstrim atau sangat miskin. Dalam bahasa Jepang, kemiskinan ekstrim ini disebut dengan *koukeiki no gekihinkon* • 好景気の激貧困. Konsep ini efektif untuk menunjukkan titik dasar yang dimaksud dan paling tidak konsep ini harus dipatuhi dalam memahami istilah *homeless*, apapun identifikasi yang digunakan, seperti sosial, perumahan, dan lain-lain. Konsep ini merupakan titik awal yang bagus sekali yang dapat menghubungkan berbagai tema yang bertalian dengan masalah *homeless*. Dari

<sup>44</sup> Untuk menyeragamkan pemakaian istilah, dalam skripsi ini akan menggunakan istilah *homeless* untuk menyebutkan *hômuresu* karena istilah *homeless* lebih familiar.

<sup>45</sup> Konsep adalah suatu gambaran abstrak yang ada di dalam kepala kita tentang suatu obyek (Kaplan yang dikutip oleh Babbie, 1992, hlm.118 dan Neuman, 1997, hlm.39).



konsep ini dapat diketahui adanya perbedaan antara kemiskinan dan kemiskinan ekstrim<sup>46</sup> (orang miskin bisa menjadi semakin miskin, sehingga jumlah orang yang sangat miskin semakin bertambah. - *Avramov*, 1994). Konsep yang kedua adalah konsep eksklusi sosial atau dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah *shakaiteki haijo* • 社会的排除.<sup>47</sup> Selain mampu juga untuk mendefinisikan kemiskinan ekstrim, konsep ini merupakan kerangka spesifik yang menghasilkan aspek baru, yaitu proses dari masalah kemiskinan tersebut secara historis. Konsep ini lebih mengutamakan proses dari pada kondisi, sehingga memperluas analisis sampai kepada bagaimana terjadinya masalah sosial tersebut.<sup>48</sup>

Tiap negara memiliki pengertian atau ketentuan garis kemiskinan yang berbeda-beda. Di Jepang, standar yang dipakai dalam menentukan seseorang berada pada garis kemiskinan adalah apabila pendapatannya berada di bawah pendapatan minimal standar perlindungan hidup yang disebut dengan istilah *seikatsuhogo kijun* • 生活保護基準. Seseorang dikatakan hidup dalam kemiskinan ekstrim apabila pendapatan yang dimiliki kurang dari biaya perlindungan hidup paling minimal. Perlindungan hidup (*seikatsuhogo*) ini dibagi berdasarkan umur dan jumlah anggota keluarga. Misalnya untuk warga yang berumur 60-69 tahun, perlindungan hidup minimalnya adalah 27.980 yen per bulan; untuk anggota keluarga 1 orang, perlindungan hidup minimal adalah 33.660 yen per bulan. Selengkapnya, berikut ini adalah tabel standar tertinggi dan terendah *seikatsuhogo* di Jepang.

---

<sup>46</sup> 生活保護の基準額の例「2006年度」、生活保護手帳2006年度版) *ibid.*, 052.

<sup>47</sup> Eksklusi sosial berarti dikeluarkan dari masyarakat. Dalam hal ini, mereka dianggap sebagai orang yang terbuang dari lingkungan sosial.

<sup>48</sup> Enzo, Mingione, *Urban Poverty and the Underclass* (USA, 1996), 86-87 dan Masami, Iwata. *Gendai no hinkon-wākingupuā-hōmuresu-seikatsuhogo* (Tokyo, 2007), hlm.107.

Tabel 5 Indikator garis kemiskinan berdasarkan standar *seikatsuhogo*

	Tingkat tertinggi (yen)	Tingkat terendah (yen)
0-2 tahun	20.900	16.200
3-5 tahun	26.350	20.420
6-11 tahun	34.070	26.400
12-19 tahun	42.080	32.610
20-40 tahun	40.270	31.210
41-59 tahun	38.180	29.590
60-69 tahun	36.100	27.980
Di atas 70 tahun	32.340	25.510
1 orang	43.430	33.660
2 orang	48.070	37.250
3 orang	53.290	41.300
4 orang	55.160	42.750
5 orang ke atas	Tiap penambahan satu orang ditambahkan 400 yen dari jumlah sebelumnya	Tiap penambahan satu orang ditambahkan 360 yen dari jumlah sebelumnya
Bantuan Perumahan	13.000	8.000
Bantuan Pendidikan		
SD	2.150	2.150
SMP	4.180	4.180

Rumus untuk mengetahui berapa standar garis kemiskinan dalam sebuah keluarga adalah jumlah pendapatan *seikatsuhogo* minimal masing-masing anggota keluarga berdasarkan usia (beranggota 1-4 orang x 0,96 dan yang beranggota 5 orang lebih x 0,93) + jumlah pendapatan *seikatsuhogo* minimal berdasarkan jumlah anggota keluarga + bantuan perumahan + bantuan pendidikan. Melalui data dan rumus tersebut, apabila jumlah penghasilan sebuah keluarga berada di bawah jumlah biaya hidup minimal berdasarkan standar *seikatsuhogo*, dapat dikatakan bahwa keluarga tersebut berada di bawah garis kemiskinan.<sup>49</sup>

Bersandar pada konsep kemiskinan sebagai kerangka konsep *homeless*, studi ini akan menganalisa keadaan dan karakteristik *homeless*, serta penyebab terjadinya *homeless* di Jepang.

<sup>49</sup> Masami, Iwata. *Gendai no hinkon-wākingupuā-hōmuresu-seikatsuhogo* (Tokyo, 2007), hlm.059.

### 3.2 Latar Belakang Historis

Masalah *homeless* bukanlah fenomena baru dalam masyarakat Jepang.<sup>50</sup> Orang-orang miskin yang tinggal dan tidur di jalanan sesungguhnya sudah ada sejak sebelum perang dunia kedua. Hanya saja jumlah mereka sedikit, sehingga tidak tampak ke permukaan.

Pada masa setelah perang dunia kedua, kaum *homeless* pada umumnya berasal korban-korban perang dunia kedua. Pada akhir tahun 1950, sekelompok peneliti yang menjelajahi seluruh Jepang untuk mempelajari kondisi orang-orang lapisan bawah memperkirakan total 40.000-50.000 orang tidur di gubuk, dan 8000 orang yang lainnya di jalanan (Akiyama, Mori, dan Yamashita 1960: 81). Kira-kira pada tahun yang sama, pemerintah metropolitan Tokyo (TMG) menghitung jumlah *homeless* sebanyak 4.500 orang, termasuk 463 *homeless* jalanan (ibid.: 31). Pada masa pertumbuhan ekonomi yang pesat (tahun 1951-1970), jumlah kaum *homeless* semakin berkurang. Perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa telah membentuk banyak pekerjaan, khususnya dalam bidang pertambangan, manufaktur, konstruksi, dan layanan jasa. Perluasan kesempatan kerja membantu mengurangi jumlah *homeless* dan berfungsi untuk mencegah timbulnya *homeless*. Hal ini menyebabkan kaum *homeless* pada masa pertumbuhan ekonomi pesat tidak tampak ke permukaan.<sup>51</sup>

Pada tahun 1970-an, meskipun para kaum *homeless* tetap ada, kebanyakan tidak tampak dalam masyarakat Jepang karena keberadaan mereka merupakan fenomena sementara dan singkat serta terbatas hanya pada kaum buruh harian di *yoseba*, yaitu sebutan untuk tempat jasa bantuan untuk menunggu lowongan pekerjaan dan losmen peristirahatan bagi para buruh harian.<sup>52</sup> Para kaum *yoseba*

---

<sup>50</sup> Seiring dengan sejarah kemiskinan, fenomena *homeless* sebenarnya telah ada sejak awal peradaban manusia termasuk di Barat. Saat itu, orang-orang yang tidak memiliki rumah, hidup sebagai budak kaum kelas atas. Jadi, bisa dikatakan bahwa fenomena *homeless* telah lebih dahulu terjadi di Barat sebelum terjadi di Jepang.

<sup>51</sup> Miki, Hasegawa, *We Are Not Garbage! The Homeless Movement in Tokyo, 1994-2002*. (Routledge New York & London, 2006), hlm.23-34.

<sup>52</sup> Masami, Iwata. *Gendai no hinkon-wākingupuā-hōmuresu-seikatsuhogo* (Tokyo, 2007), hlm.099.

mayoritas adalah buruh harian laki-laki yang pada umumnya bekerja di bidang konstruksi. Pada awal tahun 1970-an, *yoseba* telah menjadi tempat tinggal para buruh. Pada masa Jepang mengalami resesi ekonomi, banyak dari mereka tidak pernah lagi mendapat pekerjaan konstruksi, hingga pada akhirnya mereka hidup menjadi *homeless*. Resesi ekonomi ini dipicu oleh krisis minyak (*oil shock*)<sup>53</sup> pertama tahun 1973. Setelah krisis minyak tersebut, mereka cenderung menjadi *homeless* musiman, yaitu saat tidak ada pekerjaan mereka akhirnya menjadi *homeless*. Pada masa krisis minyak, selain industri bangunan, industri-industri lainnya juga secara besar-besaran berhenti menggaji para kaum *yoseba* (mem-PHK<sup>54</sup>). Pekerjaan para kaum *yoseba* berubah-ubah tergantung pada jadwal pemerintah memberikan proyek. Hal itu disebabkan karena industri tempat mereka bekerja sangat tergantung pada proyek ini. Pekerjaan mereka meningkat pada bulan Februari dan Maret, tepat sebelum dimulainya tahun fiskal baru. Kemudian, berkurang antara bulan April dan Juli, pada masa musim hujan, dan setelah itu meningkat kembali, kemudian menurun lagi pada masa liburan musim dingin, yaitu pada akhir bulan Desember sampai Januari. Jadi masalah *homeless* berubah-ubah tergantung pada kondisi. Inilah yang dimaksud dengan *homeless* musiman.

Selama tahun 1980-an, kaum *homeless* tidak tampak ke permukaan karena yang mengalami *homeless* terbatas hanya di kalangan kaum buruh harian di *yoseba* yang tidak mendapatkan lowongan pekerjaan (*homeless* musiman). Akan tetapi, memasuki tahun 1990-an, situasi *homeless* sudah mulai tampak ke permukaan karena jumlah buruh harian yang mengalami *homeless* semakin banyak. Kemudian, pada akhir tahun 1990-an, jumlah *homeless* semakin meningkat dengan semakin banyaknya komunitas *homeless* yang berasal dari kalangan pekerja reguler dan non reguler dalam perusahaan Jepang. Saat ini, jumlah

---

<sup>53</sup> *oil shock* yang ke-2 terjadi tahun 1979, *oil shock* yang ke-3 terjadi tahun 1990-1991. Pertumbuhan ekonomi Jepang merosot tajam setelah krisis minyak. Sebelumnya 10% per tahun. Sesudah krisis pertama menjadi 5% dan sesudah krisis kedua menjadi 3%. (Shotaro Ishinomori, *Rahasia Japan Inc.-Menyingkap Habis Siasat Bisnis Jepang Dalam Perang Dagang dengan Amerika* (Jepang: diterjemahkan atas izin Nihon Keizai Shimbun, 1989), hlm.118.

<sup>54</sup> PHK (Putus Hubungan Kerja)

*homeless* di kota-kota besar seluruh Jepang mengalami peningkatan yang sangat tajam, untuk pertama kalinya sejak akhir perang dunia kedua.<sup>55</sup>

### 3.3 Kondisi *Homeless* di Jepang

#### 3.3.1 Jumlah *Homeless*

Dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini, jumlah *homeless* di Jepang meningkat secara drastis.<sup>56</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang, pada tahun 2003 terdapat 25.296 orang *homeless* di Jepang. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang terbanyak dari penelitian yang pernah dilakukan.

**Tabel 6 Jumlah *homeless* di Jepang**

(orang)

	Tahun 1999	Tahun 2001	Tahun 2003
<b>Seluruh Jepang</b>	20.451	24.090	25.296
Tokyo	5.800	5.600	5.927
Osaka	8.660	8.660	6.603
Nagoya	1.019	1.318	1.788
Yokohama	794	602	470
Kawasaki	901	901	829
Kyoto	300	492	624
Kobe	335	341	323
Fukuoka	269	341	607
Kita Kyushu	166	197	421
Hiroshima	115	207	156
Sapporo	43	68	83
Sendai	111	131	203
Chiba	113	123	126

SUMBER: Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang (laporan penelitian mengenai keadaan *homeless* di seluruh Jepang), tahun 1999 - 2007

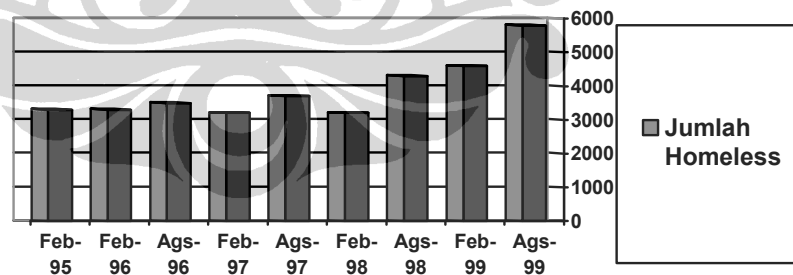
<sup>55</sup> *ibid.*,34-37

<sup>56</sup> *Hômuresu to sumai no kenri*. Jyûtakuhakusho 2004-2005. (Nihon Jyûtakukaigiron.(Domesu Shuppan, 2004), hlm.24.

Pada tahun 1990-an, penelitian jumlah *homeless* di seluruh Jepang belum dilakukan sehingga data terbatas pada penelitian pemerintahan daerah tertentu, seperti Pemerintah Metropolitan Tokyo (GMT). Untuk mengetahui perkembangan jumlah *homeless* sejak awal tahun 1990-an, berikut ini data dari pemerintah lokal Metropolitan Tokyo<sup>57</sup>.

Tabel 7 Hasil penelitian jumlah *homeless* di Tokyo

Tempat	(orang)									
	Feb 1995	Feb 1996	Agust 1996	Feb 1997	Agust 1997	Feb 1998	Agust 1998	Feb 1999	Agust 1999	
<b>Total</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>	<b>3500</b>	<b>3200</b>	<b>3700</b>	<b>3200</b>	<b>4300</b>	<b>4600</b>	<b>5798</b>	
Taman	1600	1600	2200	1800	2300	1750	2750	2600	3855	
Pinggir Jalan	600	800	700	650	700	450	550	700	731	
Stasiun K.A	700	400	100	200	100	250	150	300	157	
Sekitar Sungai	400	500	500	500	550	650	700	800	860	
Lain-lain				50	50	100	150	200	195	



Grafik 5 Jumlah *homeless* di Tokyo

SUMBER: Pemerintah lokal Metropolitan Tokyo (GMT)

Selain data di atas, pada tahun 1993 diperkirakan terdapat sekitar 1000 orang *homeless* di Tokyo dan pada tahun 1994 terdapat 2000 orang. Jumlah *homeless* di

<sup>57</sup> Masami, Iwata. *Hômuresu/Gendai Shakai/Fukushi Kokka-“Ikiteiku Basho wo Megutte* (Tokyo, 2005), hlm.45.

Tokyo semakin meningkat dari tahun ke tahun dan dari tahun 1993 sampai tahun 1999 terdapat kenaikan jumlah *homeless* sebanyak enam kali lipat.

Apabila mencermati kembali tabel di atas, tampak bahwa jumlah *homeless* yang paling banyak terdapat di kota besar Osaka dan Tokyo. Beberapa akademisi menjelaskan bahwa skala ekonomi di Tokyo lebih besar dari pada di Osaka, sehingga Tokyo dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan di Osaka (Mizu'uchi 2001). Sementara itu, Osaka merupakan kota industri berat, sehingga ketika sektor industri ini menghadapi situasi kerja yang menurun akan membuat orang-orang tersebut rentan terhadap *homeless* (Aoki 2003).

Dari data di atas dapat diketahui pula bahwa dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999, mayoritas kaum *homeless* di Tokyo menjadikan taman sebagai tempat untuk tinggal, meskipun jumlahnya naik turun setiap tahun. Demikian juga kaum *homeless* di seluruh Jepang, berdasarkan hasil penelitian Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang tahun 2003, mayoritas kaum *homeless* menjadikan taman sebagai tempat untuk tinggal, yaitu 40,8%. Sementara itu, jumlah kaum *homeless* di Tokyo yang tinggal di sekitar stasiun kereta berkurang hampir tujuh kali lipat, yaitu dari 700 orang pada tahun 1995 menjadi 157 orang pada tahun 1999 dan berdasarkan penelitian tahun 2003 di seluruh Jepang, jumlah kaum *homeless* yang tinggal di sekitar stasiun kereta hanya 5%.

### 3.3.2 Karakteristik *Homeless*

Melalui hasil penelitian yang pernah dilakukan di Jepang berikut ini akan dianalisa karakteristik *homeless* di Jepang berdasarkan jenis kelamin, usia, status pendidikan, status pernikahan, dan kondisi hunian, serta pola mobilitas.

Tabel 8 Karakteristik berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan<sup>58</sup> (%)

		Penelitian seluruh Jepang	Penelitian di Tokyo	Penelitian di Osaka
Tahun penelitian		2003	2000	1998
Jenis kelamin	Laki-laki	95,2	97,7	97,0
	Perempuan	4,8	2,1	3,0
Usia	15 - 39 tahun	4,5	6,7	3,2
	40 - 49 tahun	14,7	19,6	17,1
	50 - 59 tahun	45,4	47,9	45,0
	60 - 69 tahun	35,4	25,4	34,7
	Usia rata-rata	55,9	54,0	55,8
Status pendidikan	Lulus SMP (sampai pendidikan wajib)	54,6	60,2	62,0
	Lulus SMA	31,5	28,8	32,2
	Di atas SMA	12,2	8,4	5,4
Status pernikahan	Menikah	53,4	47,1	69,7
	Tidak menikah	46,6	52,9	30,3

SUMBER: Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang (laporan penelitian mengenai keadaan *homeless* di seluruh Jepang), tahun 2003; lokakarya kehidupan kota (penelitian kehidupan para *homeless* di Tokyo pada tahun 2000; lokakarya masalah lingkungan kota oleh universitas Osaka (penelitian mengenai *homeless*).

### 1. Mayoritas Laki-laki

Menurut data Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan buruh Jepang tahun 2003, tercatat 2.014 orang (95,2 %) berjenis kelamin laki-laki dan 101 orang (4,8%) berjenis kelamin perempuan. Ini jelas menunjukkan bahwa mayoritas *homeless* di Jepang adalah laki-laki. Jumlah *homeless* perempuan sedikit karena perempuan lebih banyak memiliki akses sebagai pekerja *part time*. Selain itu, Kennett dan Iwata (2003: 36) menyatakan bahwa *homeless* wanita lebih tersembunyi dari pada *homeless* laki-laki dan wanita memiliki

<sup>58</sup> Iwata, Masami. *Gendai no hinkon-wākingupuā-hōmuresu-seikatsuhogo* (Tokyo, 2007), hlm.123.

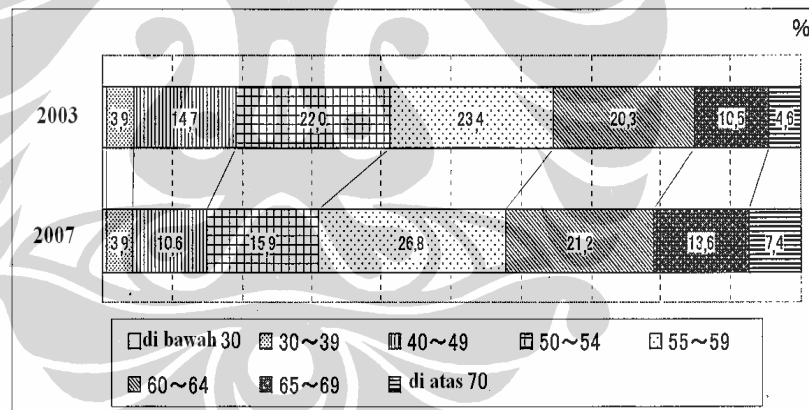


kemungkinan besar masuk ke dalam industri seks untuk bertahan hidup, sehingga tidak sampai menjadi *homeless*. Hal tersebut merupakan stigma sosial mengenai perempuan yang telah terbentuk dalam masyarakat yang menyebabkan *homeless* laki-laki lebih banyak daripada *homeless* perempuan.

## 2. Usia Tua

Menurut tabel di atas, mayoritas *homeless* berada pada kelompok usia 50–59 tahun (sekitar 45%), kemudian kelompok usia 60–69 tahun (sekitar 35%). Secara keseluruhan, usia rata-rata *homeless* di Jepang adalah 55,9 tahun. Kondisi ini terkait dengan masalah *kôreika shakai*・高齢化社会(masyarakat menua) yang sedang dihadapi oleh Jepang saat ini.<sup>59</sup>

Jumlah ini merupakan jumlah yang tidak sedikit dan akan semakin bertambah jika mereka yang berada di kelompok usia 50-64 tahun tetap menjadi *homeless*, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini<sup>60</sup>:



Grafik 6 Persentase jumlah *homeless* berdasarkan kelompok usia

SUMBER: Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang (laporan penelitian mengenai keadaan *homeless* di seluruh Jepang tahun 2007)

<sup>59</sup> *Kôreika Shakai* memiliki arti masyarakat menua. Dalam bukunya yang berjudul *Kôreika Shakai* (1982), *Yoshida Sumio* menuliskan definisi PBB tentang negara yang berpenduduk menua, yaitu populasi penduduk suatu negara dikatakan menua apabila jumlah penduduk lanjut usia (yang berusia lebih dari 65 tahun) telah mencapai 7% dari jumlah penduduk keseluruhan.

<sup>60</sup> Hasil penelitian di seluruh Jepang yang diadakan pada tahun 2007 oleh Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang

Pada penelitian berikutnya tahun 2007, jumlah *homeless* yang berada pada kelompok lansia (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 15% pada tahun 2003 menjadi 21% pada tahun 2007. Keadaan ini menunjukkan bahwa masalah *kôreika shakai* atau masyarakat menua telah berkembang di tengah-tengah kaum *homeless* di Jepang. Dalam usia lansia, tentu saja fisik mereka sudah semakin melemah dan berada pada masa mulai berakhirnya produktivitas mereka, terutama dalam hal bekerja. Akibat, kurangnya produktivitas kaum lansia dalam perusahaan, saat ini tidak ada pekerjaan buat para lansia yang berusia 70 tahun ke atas. Dalam kondisi seperti ini, mereka tidak mungkin mampu untuk menyewa sebuah apartemen sebagai tempat untuk tinggal, sehingga mereka terpaksa harus tinggal dan tidur di luar dengan berstatus sebagai *homeless*.

Di lihat dari usia, *homeless* di Jepang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, mayoritas *homeless* tergolong masih muda<sup>61</sup>, sedangkan di Jepang mayoritas adalah laki-laki setengah tua. Berbeda dengan di negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia, *homeless* anak-anak atau dikenal dengan istilah *sutoriito chirudoren* • ストリートチルドレン (*street children*): anak jalanan, tidak ditemukan di Jepang.

### 3. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Tidak hanya dilihat dari usia, karakteristik *homeless* Jepang juga dapat diamati dari tingkat pendidikan. Dalam tabel di atas, mayoritas kaum *homeless* hanya memiliki tingkat pendidikan sampai jenjang pendidikan wajib (SMP), yaitu 54,6% di seluruh Jepang, 60,2% di Tokyo, dan 31,5% di Osaka. Kemudian, mereka yang lulus SMA terdapat 31,5% di seluruh Jepang, 28,8% di Tokyo, dan 32,2% di Osaka. Sementara mereka yang memiliki status pendidikan di atas SMA hanya sedikit, yaitu 12,2% di seluruh Jepang, 8,4% di Tokyo, dan 5,4% di Osaka. Tingkat pendidikan yang rendah membuat mereka tidak mampu menghadapi masa krisis dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, sebab Jepang memegang *gakureki shakai* yang menjunjung tinggi latar belakang

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, 121

pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan terjamin. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik.

#### 4. Status Pernikahan : Tidak Menikah (*Mikon* • 未婚)

Karakteristik *homeless* yang berikutnya adalah banyaknya kaum *homeless* yang tidak menikah atau belum menikah (*mikon*), yaitu 46,6% dan angka ini semakin bertambah pada penelitian tahun 2007 menjadi 53,7%. Kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah orang Jepang yang tidak menikah. Mengingat bahwa mayoritas kaum *homeless* adalah laki-laki, berikut ini adalah data persentase jumlah laki-laki *mikon* di Jepang.

Tabel 9 Laki-laki *mikon* di Jepang

(%)

	1980	1990	2000
20 ~ 24	91,5%	92,2%	92,9%
25 ~ 29	55,1%	64,4%	69,3%
30 ~ 34	21,5%	32,6%	42,9%
35 ~ 39	8,5%	19,0%	25,7%
40 ~ 44	4,7%	11,7%	18,4%

SUMBER: Kantor Biro Statistik Jepang

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki Jepang yang tidak menikah pada kelompok usia 30 tahun ke atas meningkat tajam dan kelompok usia 40 tahun meningkat empat kali lipat dari tahun 1980 sampai tahun 2000. Dahulu, laki-laki yang berusia di atas 40 tahun pada umumnya menikah, tetapi saat ini sudah semakin sulit. Hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit di Jepang. Misalnya, bagi para buruh harian, mereka memilih untuk tidak menikah karena sadar akan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri mereka, sebab untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja mereka mengalami kesulitan. Situasi semakin sulitnya memenuhi

kebutuhan hidup merupakan salah satu faktor utama banyaknya orang Jepang yang tidak menikah (*mikon*).<sup>62</sup>

Dengan status tidak menikah tentu saja telah membuat keadaan mereka semakin sulit dan rentan terhadap *homeless* karena mereka semakin sulit menjalani hidup tanpa ada relasi atau keluarga yang menyokong dan mengurus.

## 5. Karakteristik Hunian dan Pola Mobilitas

Selain beberapa karakteristik di atas, *homeless* di Jepang juga memiliki karakteristik hunian dan pola mobilitas. Berikut ini adalah data tempat tinggal para *homeless* berdasarkan penelitian Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang tahun 2003.

**Tabel 10 Tempat tinggal para *homeless***

Tempat	Jumlah orang	%
Taman	10.310	40,8
Bantaran sungai	5.906	23,3
Jalanan	4.360	17,2
Sekitar stasiun kereta	1.254	5,0
Tempat umum lainnya	3.466	13,7
Total	25.296	100,0

SUMBER: Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang tahun 2003

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas *homeless* tinggal di taman-taman (40,8%). Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang sama, 12,3% di antaranya hidup berpindah-pindah. Pola mobilitas mereka adalah bekerja di siang hari, menghabiskan waktu dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat umum lainnya, dan setelah malam mereka mencari tempat untuk berteduh dari angin atau hujan. Kaum *homeless* yang memiliki pola mobilitas

<sup>62</sup> Tom, Gill, *Men of Uncertainty-The Social Organization of Day Laborers in Contemporary Japan* (State University of New York, 2001), hlm.115

demikian sering disebut dengan *ryokoujin* (行旅人) karena sepanjang hari mereka hanya berkeliling di tengah kota dan tak tentu arah. Pada saat musim dingin, untuk menghindari diri dari rasa dingin (*toushi* (凍死 : membeku sampai mati), mereka bangun dan bergerak di malam hari. Kemudian di tengah hari mereka tidur di dalam fasilitas umum seperti di dalam stasiun kereta.

*Homeless* di Jepang memiliki keunikan tempat hunian, yaitu mayoritas mendirikan ruangan kecil dengan menggunakan kardus atau terpal biru sebagai tenda (54,4%)<sup>63</sup>. Ada juga sekelompok *homeless* yang mendirikan tenda-tenda di suatu tempat tertentu (biasanya taman), dan tempat ini dibuat menjadi suatu perkampungan para *homeless*. Suasana seperti ini dapat ditemukan di sekitar taman *Ueno* (*Ueno Park*). *Ueno* merupakan salah satu tempat di Tokyo yang banyak terdapat kaum *homeless*. Jumlah *homeless* yang tinggal dengan cara seperti ini semakin meningkat, sehingga menimbulkan masalah sosial baru karena keberadaan mereka dianggap merusak keindahan lingkungan. Berbeda dengan kaum *homeless* di Jepang, di Indonesia para *homeless* pada umumnya tidur di tempat-tempat umum tanpa alas. (Gambar dapat dilihat pada bagian lampiran skripsi ini, hlm. 58).

### 3.4. Jenis *Homeless*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang pada tahun 2003, mayoritas alasan para *homeless* menjadi *homeless* adalah sebagai berikut:

Alasan menjadi *homeless* (jawaban ganda):

1. Lapangan pekerjaan berkurang (*shigoto ga hetta* (仕事が減った) **35,6%**)
2. Perusahaan bangkrut, di-PHK (*tōsan* (倒産) (shitsugyō) (失業) **32,9%**)

---

<sup>63</sup> Hasil penelitian Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang (laporan penelitian mengenai keadaan *homeless* di seluruh Jepang), tahun 2003

3. Tidak bisa bekerja karena sakit, luka, dan usia sudah lanjut (*byôki • kega • kôreika de shigoto ga dekinakunatta • 病気 • けが • 高齢で仕事ができなくなった*) **18,8%**
4. Penghasilan berkurang (*shûnyû ga hetta • 収入が減った*) **16,4%**

Keempat alasan di atas merupakan alasan pekerjaan yang berarti bahwa penyebab utama munculnya *homeless* di Jepang adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah *homeless* perlu menganalisa pengaruh struktur ekonomi terhadap munculnya *homeless*.

Selain faktor ekonomi, terdapat pula faktor sosial yang menyebabkan seseorang menjadi *homeless*, seperti perceraian dan masalah *Kôreika shakai* (masyarakat menua). Akan tetapi, oleh karena mayoritas alasan para *homeless* mengalami kehidupan *homeless* adalah masalah pekerjaan yang bersifat ekonomi, maka penelitian ini lebih memfokuskan struktur ekonomi sebagai penyebab munculnya *homeless*.

Sebelum menganalisa lebih jauh mengenai pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap munculnya *homeless*, perlu diketahui terlebih dahulu latar belakang pekerjaan mereka sebelum menjadi *homeless*. Berikut ini merupakan data dari hasil penelitian Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang tahun 1999.

Tabel 11 Pekerjaan terlama dan pekerjaan terakhir sebelum menjadi *homeless* (%)

	Jenis pekerjaan	Pekerjaan terlama	Pekerjaan terakhir
1	<i>Keieisha • Kaishayakuin</i> (Manajer • Anggota direksi)	1,7	1,1
2	<i>Jiei</i> (wiraswasta)	5,5	3,5
3	<i>Seishain</i> (pekerja reguler)	55,9	28,1
4	<i>Hiseishain</i> (pekerja non reguler)	11,8	16,2

5	<i>Hiyatoi</i> (Pekerja harian)	21,3	44,2
6	Lain-lain	1,5	1,7
	Jawaban tidak jelas	2,3	5,2
	Total	100,0	100

SUMBER: Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang (penelitian mengenai keadaan *homeless* di Jepang), tahun 1999.

Dari data pada tabel 11 dapat diketahui bahwa mayoritas para *homeless* memulai sejarah pekerjaan mereka sebagai pekerja reguler • *seishain* (55,9%) dan itu berlangsung cukup lama. Kemudian, pekerjaan terakhir sebelum menjadi *homeless*, mayoritas adalah pekerja harian, yaitu 44,2%. Sebagian besar mereka bekerja di industri sekunder (sektor konstruksi • *kensetsukōzō* (52,2%) dan sektor manufaktur • *seizōgyō* (10,5%)).

Apabila mengamati kembali data di atas, jumlah *homeless* yang berasal dari pekerja reguler juga banyak, yaitu 28,1%. Mereka adalah pekerja yang berasal dari kelas menengah dan bekerja di kantor-kantor suatu perusahaan (*white collar*). Para pekerja reguler tersebut banyak juga yang akhirnya menjadi buruh harian. Survei mengenai *homeless* jarang menjelaskan ukuran perusahaan tempat mereka bekerja pada waktu mereka bekerja sebagai pekerja reguler (*seishain* • 正社員). Akan tetapi, bisa diketahui bahwa mereka bekerja di perusahaan kecil dan menengah bukan di perusahaan besar, mengingat bahwa mereka hidup sendiri dengan latar belakang pendidikan rendah. Selain itu, perusahaan kecil lebih mudah mengalami fluktuasi ekonomi, dan perusahaan ini termasuk para pekerjanya, baik pekerja reguler, maupun pekerja non reguler, lebih mudah mengalami kebangkrutan bisnis dari pada perusahaan besar.

Data di atas juga menunjukkan bahwa jumlah *homeless* yang berasal dari pekerja non reguler<sup>64</sup> juga terhitung cukup banyak, yaitu 16,2%. Jadi, dari penjelasan di

<sup>64</sup> Pekerja: *paato* dan *arubaito* merupakan pekerja *part time* atau paruh waktu yang bekerja dengan lama waktu bekerja lebih sedikit dari pada pekerja reguler. Pekerja *paato* mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga dan pekerja *arubaito* mayoritas adalah mahasiswa.

atas mengenai alasan menjadi *homeless* dan pekerjaan terlama dan terakhir sebelum menjadi *homeless*, dapat disimpulkan bahwa *homeless* berasal dari tiga komunitas besar, yaitu:

1. *Homeless* yang berasal dari buruh harian (*hiyatoirôdôsha*)
2. *Homeless* yang berasal dari pekerja reguler (*seishain*)
3. *Homeless* yang berasal dari pekerja non reguler (*hiseishain*)

### 3.5 *Homeless* sebagai Dampak Kemiskinan Struktural

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa *homeless* di Jepang berasal dari tiga komunitas besar, yaitu dari kaum buruh harian, pekerja reguler, dan pekerja non reguler. Untuk mengetahui latar belakang penyebab ketiga komunitas tersebut menjadi *homeless*, perlu dianalisa secara ekonomi, mengingat bahwa alasan mereka menjadi *homeless* mayoritas adalah alasan pekerjaan. Bersandar pada asumsi awal bahwa *homeless* di Jepang merupakan suatu bentuk kemiskinan struktural, studi ini akan menganalisa pengaruh struktur ekonomi Jepang terhadap munculnya *homeless* dari ketiga komunitas di atas. Struktur ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah struktur industri dan restrukturisasi perusahaan Jepang. Struktur ini mempengaruhi munculnya *homeless* dari kalangan buruh harian dan pekerja reguler maupun pekerja non reguler.

#### 3.5.1 *Homeless* dari Kaum Buruh Harian *Yoseba*

Dalam bahasa Jepang, pengertian *yoseba* (寄せ場)<sup>65</sup> adalah 日雇労働者の仕事の斡旋がなされる場所や簡易宿泊所などが立ち並ぶ地図の呼称 (*hiyatoirôdôsha no shigoto no assen ga nasareru basho ya kan'ishukuhakusho*)

---

Pekerja temporer (*shokutaku* • 嘱託) memiliki beberapa variasi jenis kerja, seperti pekerja *rinji* atau *rinjihiyatoi* atau *hiyatoi* (buruh harian yang bekerja kurang dari 30 hari), *keiyaku* (pekerja yang memiliki keahlian khusus dan dikontrak oleh perusahaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan), dan pekerja *haken* • 派遣, yaitu pekerja yang diutus oleh suatu agensi untuk bekerja di suatu perusahaan.

<sup>65</sup> *Yoseba* berasal dari kata 'yoru' yang artinya berkumpul, berkerumun dan 'ba' yang artinya tempat, sehingga bisa diartikan sebagai tempat orang-orang berkumpul. Kata lain dari *yoseba* adalah *yoriba*. (Tom, Gill, *Men of Uncertainty-The Social Organization of Day Laborers in Contemporary Japan* (State University of New York, 2001), hlm.4.



*nado ga tachinarabu chizu no koshō*<sup>66</sup>, artinya sebutan untuk tempat jasa bantuan pekerjaan dan losmen peristirahatan bagi para buruh harian. Sejak awal tahun 1970-an, *yoseba* telah menjadi tempat tinggal para buruh harian dan tempat untuk menunggu lowongan pekerjaan bagi para buruh harian.<sup>67</sup> Para kaum *yoseba* mayoritas adalah buruh harian laki-laki dan pada umumnya bekerja di bidang konstruksi dan manufaktur (industri sekunder), sehingga kesejahteraan kaum *yoseba* sangat tergantung pada perkembangan dan kesempatan kerja dalam industri ini.

Munculnya *homeless* di kalangan buruh harian berkaitan dengan struktur industri, khususnya industri sekunder, yaitu struktur *keiretsu*, dan struktur kesempatan kerja dalam industri tersebut.

### 3.5.1.1 Pengaruh Struktur *Keiretsu*

Industri Jepang memiliki sebuah sistem hierarki sebagai struktur industri, yaitu sistem *keiretsu* sebagai gabungan industri-industri besar yang berada pada tingkat tertinggi dalam struktur industri dan membawahi industri-industri kecil yang terdiri dari perusahaan-perusahaan kontraktor, subkontraktor, dan sub-subkontraktor. Para buruh harian berada pada struktur yang paling kecil, yaitu di bagian subkontraktor dan sub-subkontraktor. Pada umumnya, pekerjaan para buruh harian adalah pekerjaan yang dikenal dengan istilah 3K yaitu *kitsui* (sulit), *kiken* (berbahaya), dan *kitanai* (kotor). Di Jepang terdapat sebuah institusi perantara untuk mendapatkan lowongan pekerjaan sebagai buruh harian yang dikenal dengan istilah *yoseba*.

Banyak dari perusahaan subkontraktor memiliki hubungan dengan para *yakuza* yang menjadi calo buruh harian (*tehaishi*) di *yoseba*. Para buruh harian sering kali dipekerjakan oleh para *yakuza* pada pekerjaan yang sangat berbahaya dan bahkan dengan kekerasan. Para calo ini sering kali menahan gaji para buruh harian dan

<sup>66</sup> Masami, Iwata. *Gendai no hinkon-wākingupuā-hōmuresu-seikatsuhogo* (Tokyo, 2007), hlm.099

<sup>67</sup> Miki, Hasegawa, *We Are Not Garbage! The Homeless Movement in Tokyo, 1994-2002*. (Routledge New York & London, 2006), hlm.33.

ketika mereka mengalami kecelakaan saat bekerja, mereka tidak diberikan perawatan medis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya jaminan hari esok untuk para buruh harian. Para buruh harian yang kecelakaan saat bekerja sering kali tidak mampu bekerja kembali dan ketika uang mereka telah habis, akhirnya mereka akan kehilangan tempat tinggal dan menjadi *homeless*.

Melalui sistem subkontrak dalam struktur *keiretsu*, buruh harian dimarginalisasikan menjadi bagian yang terbawah yang diperkerjakan saat dibutuhkan dan dibuang saat tidak dibutuhkan sesuai dengan permintaan tenaga kerja. Industri konstruksi sebagai salah satu dari industri sekunder merupakan industri yang lebih rawan mengalami kebangkrutan dibanding industri lainnya karena industri ini tergantung pada proyek pekerjaan publik atau proyek pembangunan. Bahkan jika proyek ini terkonsentrasi secara tidak seimbang pada sebagian kecil perusahaan besar (Shiina 1997) akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan kecil (subkontraktor), khususnya perusahaan subkontraktor yang paling bawah atau paling kecil mengalami kelebihan tenaga kerja (Hippô 1992), sehingga harus mengurangi tenaga kerjanya. Dalam hal ini, buruh harian merupakan korban utama yang mengalami pengurangan tenaga kerja.<sup>68</sup> Kondisi buruh harian ini menggambarkan suatu masyarakat kapitalis yang kejam dan telah terstruktur menjadi golongan terbawah dalam struktur industri.

### **3.5.1.2 Pengaruh Struktur Kesempatan Kerja**

Selama tahun 1980-an, kaum *homeless* tidak tampak ke permukaan karena merupakan fenomena sementara dan yang mengalami *homeless* terbatas hanya di kalangan kaum buruh harian di *yoseba* yang tidak mendapatkan pekerjaan (*homeless* musiman). Akan tetapi, pecahnya balon ekonomi pada awal tahun 1990-an telah membawa dampak yang buruk bagi para buruh harian. Resesi ekonomi telah menyebabkan kesempatan kerja pada industri sekunder telah mengalami penurunan dan industri Jepang telah mengurangi jumlah kesempatan kerja bagi buruh harian.

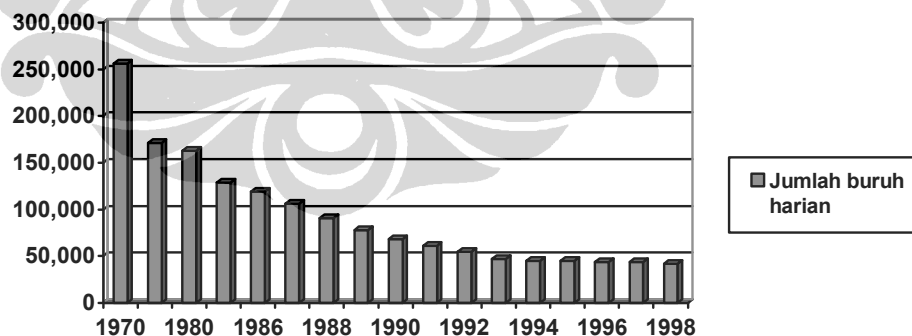
---

<sup>68</sup> *Ibid.*, 46

Berkurangnya kesempatan kerja dalam industri sekunder seperti yang telah disebutkan pada bagian Bab 2 dalam skripsi ini, telah memberikan goncangan bagi para buruh harian *yoseba* yang merupakan golongan pekerja paling bawah dalam struktur industri. Industri sekunder, yaitu industri konstruksi dan manufaktur merupakan industri yang menyerap banyak pekerja harian (*hiyatoirôdôsha* • 日雇労働者), sehingga kesejahteraan hidup mereka sangat tergantung pada perkembangan industri ini. Pemerintah mencatat bahwa negara mengalami resesi ekonomi sejak bulan ketiga tahun 1991 sampai tahun 1994, dan jatuh kembali ke dalam resesi ekonomi tahun 1998. Di kalangan buruh harian, resesi pada umumnya mulai sekitar tahun 1991, dan masih terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2000-an.<sup>69</sup>

Ada tiga *yoseba* • 寄せ場 yang terkenal di Jepang, yaitu Kamagasaki di Osaka, San'ya, di Tokyo, dan Kotobuki di Yokohama. Pada pertengahan tahun 1990-an, kantor Kementerian Buruh mencatat terdapat 21.000 orang buruh harian di sekitar Kamagasaki, 9000 orang di San'ya, 6000 orang di Kotobuki, 3000 orang di Sasashima, Nagoya, dan sejumlah kecil di *yoseba* daerah lain.

Berikut ini merupakan data jumlah buruh harian yang terdaftar di *yoseba Kotobuki* dari tahun 1970-1998.



**Grafik 7 Jumlah buruh harian yang terdaftar di Yoseba seluruh Jepang**

SUMBER: Kantor Buruh, Biro keamanan Kerja tahun 1999

<sup>69</sup> *Ibid.*, 6-7. Masa resesi setelah pecahnya balon ekonomi Jepang disebut dengan resesi Heisei, yang secara resmi dimulai pada tahun 1989 pada saat kenaikan Kaisar Akihito ke tahta kekaisaran.

Data pada grafik 7 menunjukkan bahwa buruh harian yang terdaftar di *yoseba* seluruh Jepang mengalami penurunan. Selama tiga dekade terakhir, jumlah buruh harian *yoseba* menurun drastis dari 256.000 orang pada tahun 1970 menjadi 42.000 orang pada tahun 1998. Menurunnya jumlah buruh harian berkaitan dengan semakin menurunnya sektor industri sekunder setelah terjadinya resesi ekonomi yang berkepanjangan. Selain itu, sistem perekrutan telah diubah, yaitu melalui pengumuman di surat kabar dan majalah bulanan. Perekrut tenaga kerja juga lebih memilih para buruh yang masih muda karena lebih produktif. Sementara itu, buruh harian di *yoseba* mayoritas adalah orang tua yang rata-rata berusia 55 tahun. Kondisi ini telah menyebabkan jumlah *homeless* di kalangan kaum *yoseba* meningkat pada tahun 1990-an.

Kuroki Toshikatsu yang menggunakan analisis kemiskinan struktural untuk menganalisa kemiskinan di Jepang menyebutkan bahwa kekurangan lowongan pekerjaan atau dikenal dengan istilah *fukanzen shūgyō* ・不完全就業 merupakan salah satu penyebab kemiskinan struktural.<sup>70</sup>

Selain kedua struktur di atas, naiknya harga sewa kamar murah merupakan salah satu penyebab kaum *yoseba* kehilangan tempat tinggal, sehingga akhirnya hidup menjadi *homeless*. Pada umumnya, para buruh harian tinggal di tempat yang disebut dengan *doya* ・ドヤ (sebutan untuk *yado* ・宿 atau rumah penginapan). Pada masa Jepang mengalami resesi ekonomi, banyak dari mereka tidak pernah lagi mendapat pekerjaan konstruksi dan akhirnya kehilangan tempat tinggal karena tidak mampu untuk membayar sewa kamar murah (*doya* ・ドヤ). Hal ini berarti bahwa ada dua jenis kaum *yoseba*, yaitu kaum *yoseba* yang mampu menyewa rumah di *doya-gai* ・ドヤ街 (daerah perumahan murah) dan kaum *yoseba* yang tidak mampu menyewa rumah rumah sehingga harus tidur di luar atau menjadi *homeless*.

---

<sup>70</sup> Deborah, J Milly. *Poverty, Equality, and Growth: The Politics of Economic Need in Postwar Japan*. (USA, 1999), hlm.218

Kenaikan sewa kamar murah ini disebabkan oleh adanya renovasi atau tata kota (gentrifikasi). Gentrifikasi adalah sebuah proses yang mengubah perumahan-perumahan murah menjadi perumahan-perumahan mahal, seperti kondominium<sup>71</sup>, atau kompleks apartemen, dan tempat komersial lainnya untuk bisnis-bisnis yang melayani para langganan kelas menengah dan kelas menengah atas (Wright dan Lam 1987: 52). Oleh karena gentrifikasi ini, uang sewa rumah-rumah murah di *doya-gai*<sup>72</sup> bagi para buruh harian *yoseba* telah dinaikkan. Hal ini menumbangkan penyewa rumah murah, sehingga menimbulkan kesulitan bagi mereka yang berpenghasilan rendah, termasuk para buruh harian.<sup>73</sup> Gentrifikasi ini merupakan salah satu penyebab krusial semakin meningkatnya jumlah *homeless* pada tahun 1990-an setelah pada tahun 1980-an keberadaan *homeless* tidak terlalu tampak ke permukaan.

Pekerjaan sebagai buruh harian merupakan pekerjaan yang tidak stabil sehingga mereka rentan terhadap *homeless*. Struktur dalam industri Jepang telah mempengaruhi munculnya *homeless* yang berasal dari kaum buruh harian di *yoseba*. Berikut ini adalah data jumlah *homeless* sepanjang tahun 1990-an yang menunjukkan peningkatan jumlah *homeless* di kalangan kaum buruh harian yang terdapat di prefektur Kanagawa.<sup>74</sup>

**Tabel 12 Rata-rata jumlah *homeless* di prefektur Kanagawa**

(orang)

Tahun	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Jumlah	93	97	129	129	547	531	576	918	1083

SUMBER: Jurnal Patroli Kotobuki, *Sukabura*

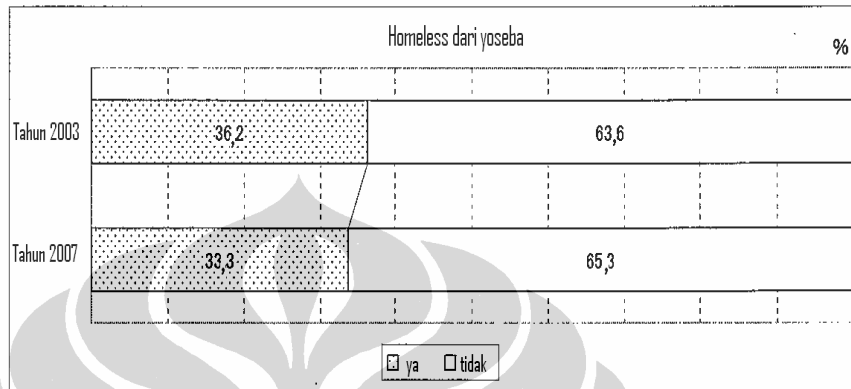
<sup>71</sup> daerah yang dikuasai bersama sebagai hak milik tersendiri

<sup>72</sup> Distrik *yoseba* tempat para buruh harian tinggal dan menunggu panggilan untuk bekerja.

<sup>73</sup> Miki, Hasegawa, *We Are Not Garbage! The Homeless Movement in Tokyo, 1994-2002*. (Routledge New York & London, 2006), hlm.40-41.

<sup>74</sup> Tom, Gill, *Men of Uncertainty-The Social Organization of Day Laborers in Contemporary Japan* (State University of New York, 2001), hlm.216.

Untuk mengetahui jumlah *homeless* yang berasal dari kaum buruh harian di *yoseba*, berikut ini adalah data jumlah *homeless* berdasarkan hasil penelitian terakhir oleh Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang tahun 2007.



**Grafik 8 Jumlah *homeless* yang berasal dari *yoseba***

SUMBER: Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang (penelitian mengenai keadaan *homeless* di Jepang), tahun 2007

Dari data di atas dapat diketahui bahwa para *homeless* yang pernah menjadi buruh harian di *yoseba* pada tahun 2003 terdapat 36,2 % dan pada tahun 2007 terdapat 33,3%. Ini berarti bahwa saat ini, yang menjadi *homeless* tidak hanya mereka yang pernah menjadi buruh harian di *yoseba*, tetapi juga pekerja reguler dan pekerja lainnya yang jumlahnya melebihi 60%.

### 3.5.2 *Homeless* dari Pekerja Reguler dan Non Reguler

Munculnya *homeless* di kalangan pekerja reguler dan non reguler dipengaruhi oleh struktur dalam perusahaan Jepang, yaitu sistem tenaga kerja. Besarnya beban perusahaan akibat krisis ekonomi setelah pecahnya *bubble economy*, memaksa perusahaan untuk melakukan restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah pegawai. Proses restrukturisasi telah membawa perubahan sistem kerja dalam perusahaan Jepang, yaitu mulai lunturnya sistem kepegawaian seumur hidup *shūshinkoyō* dan sistem gaji berdasarkan senioritas (*nenkojoretsu*). Mulai lunturnya sistem *shūshinkoyō* tidak dapat lagi memberikan jaminan bagi para pegawai supaya mereka dapat tetap bekerja dalam perusahaan mereka dan mereka tidak dapat lagi

menikmati gaji yang lebih tinggi akibat mulai berkurangnya penerapan sistem *nenkojoretsu*.

Dalam menghadapi krisis ekonomi dan kesukaran dalam keuangan, perusahaan menerapkan biaya produksi rendah dengan lebih banyak mempekerjakan pekerja non reguler (*hiseishain* • 非正社員) karena pekerja ini digaji dengan gaji yang relatif murah, jarang mendapatkan promosi, bantuan<sup>75</sup> dapat diabaikan, tidak diperlukan kontribusi asuransi sosial kepada pemerintah, dan mudah dihentikan. Ini berarti bahwa yang membedakan antara pekerja reguler dengan non reguler adalah perolehan jaminan kerja dan gaji yang lebih baik. Dengan status sebagai pekerja non reguler, masa depan dan hari tua mereka menjadi tidak terjamin sebab tidak mendapatkan jaminan kerja dan jaminan masa tua dari perusahaan. Selain itu, pekerja non reguler rentan mengalami pemberhentian kerja, sehingga mereka juga rentan mengalami *homeless*. Hal ini menunjukkan bahwa para pekerja non reguler dalam susunan perusahaan berada pada bagian yang paling rendah karena status pekerjaannya tidak stabil dan juga tidak mendapatkan bantuan-bantuan kesejahteraan dari perusahaan. Posisi seperti ini merupakan suatu keadaan yang telah terstruktur sebagai asas hubungan antar pegawai dalam suatu perusahaan yang menyatakan adanya perbedaan antara pekerja reguler dan pekerja non reguler.

Para pekerja reguler juga tidak luput dari *homeless* dan banyak yang akhirnya menjadi buruh lepas, termasuk buruh harian. Survei mengenai *homeless* jarang menjelaskan ukuran perusahaan tempat mereka bekerja pada waktu mereka bekerja sebagai pekerja reguler (*seishain* • 正社員). Akan tetapi, bisa diketahui bahwa mereka bekerja di perusahaan kecil dan menengah bukan di perusahaan besar, mengingat bahwa mereka hidup sendiri dengan latar belakang pendidikan rendah. Selain itu, perusahaan kecil lebih mudah mengalami fluktuasi ekonomi, dan perusahaan ini termasuk para pekerjanya, baik pekerja reguler, maupun pekerja non reguler, lebih mudah mengalami kebangkrutan bisnis dari pada perusahaan

---

<sup>75</sup> Bantuan di sini berarti jaminan kerja, jaminan kesehatan, maupun jaminan masa tua.

besar. Para pekerja reguler yang telah menjadi korban restrukturisasi sehingga kehilangan pekerjaan, sangat susah untuk mendapatkan kembali pekerjaan karena lowongan pekerjaan yang semakin berkurang. Sesuai dengan hasil penelitian Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang, terdapat 35,6% para *homeless* yang menyebutkan bahwa alasan mereka menjadi *homeless* adalah karena lapangan pekerjaan berkurang. Hal ini merupakan penyebab tetap banyaknya jumlah *homeless* dan bahkan semakin bertambah jumlahnya dengan munculnya *homeless* dari pekerja non reguler yang memang sangat rentan mengalami pengangguran karena pekerjaan mereka tidak stabil.

Makoto Kumazawa (2002) menjelaskan bahwa saat ini hanya terdapat 20% pertumbuhan produktivitas perusahaan setelah dilakukannya '*risutora*'.<sup>76</sup> Sementara itu, '*risutora*' telah menyebabkan meningkatnya angka pengangguran akibat bangkrutnya perusahaan oleh karena utang, tidak adanya bantuan pinjaman, dan lain-lain. Meningkatnya angka pengangguran tentu saja berkaitan dengan munculnya *homeless* ini, sebab jika tidak memperoleh pekerjaan, mereka akan rentan kehilangan tempat tinggal. Berdasarkan hasil penelitian Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Buruh Jepang tahun 2003 mengenai *homeless* di Jepang diketahui bahwa terdapat 32,9% para *homeless* yang menyebutkan bahwa alasan mereka menjadi *homeless* adalah karena perusahaan mereka bangkrut sehingga menjadi pengangguran dan akhirnya menjadi *homeless*.

Mengingat rata-rata usia orang-orang yang mengalami *homeless* adalah 55,9 tahun, dapat diketahui bahwa yang menjadi korban utama perubahan struktur perusahaan ini adalah pegawai yang sudah tua. Perusahaan Jepang lebih banyak mempekerjakan anak muda dan lulusan terbaru agar dapat memberikan gaji rendah untuk mengurangi biaya perusahaan. Selain itu, perusahaan menganggap bahwa pegawai yang sudah tua sudah tidak produktif lagi dan justru menambah beban perusahaan, sehingga mengurangi jumlah kesempatan kerja bagi orang-orang yang sudah tua. Kondisi ini menunjukkan adanya marjinalisasi di kalangan

---

<sup>76</sup> Makoto, Kumazawa. *Restra and work-sharing* (Iwanami Book, 2003), 80, 196 berdasarkan JIL (Lembaga Ketenagakerjaan Jepang), laporan penelitian tahun 2002



pekerja yang sudah tua. Angka pengangguran pada golongan usia di atas 50 tahun juga terhitung cukup banyak, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini. Meskipun dari tahun 2000 hingga tahun 2006 tingkat pengangguran pada kelompok usia 55-64 tahun menurun dari 5,6% menjadi 3,9%, angka tersebut masih terhitung cukup banyak.

**Tabel 13 Angka pengangguran berdasarkan umur**

2000			2005			2006		
15-24	25-54	55-64	15-24	25-54	55-64	15-24	25-54	55-64
9,2	4,1	5,6	8,6	4,2	4,1	8,0	3,9	3,9

SUMBER: Biro Statistik Jepang tahun 2007 Suvei Ketenagakerjaan tahun 2006)

### 3.6 Analisis Faktor Non Ekonomis

Selain faktor ekonomis, ada pula faktor non ekonomis yang memperburuk keadaan *homeless*, seperti sistem kesejahteraan sosial dan kebijakan dalam hal perumahan. Kedua hal ini merupakan struktur atau aturan yang membuat para *homeless* semakin sulit untuk keluar dari lingkaran *homeless*.

#### 3.6.1 Sistem Kesejahteraan Sosial

Dalam menganalisa kesejahteraan sosial, faktor ekonomi dan faktor sosial merupakan dua faktor yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Demikian pula dengan kebijakan pemerintah atau peraturan pemerintah tidak lepas dari kedua faktor ini. Salah satu peraturan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya *homeless* adalah pembatasan program jaminan sosial, khususnya jaminan dalam sistem perlindungan hidup (*seikatsuhogoseido* • 生活保護制度). *Seikatsuhogoseido* adalah suatu sistem pengadaan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diberikan oleh sektor publik kepada keluarga yang kekurangan penghasilan oleh karena alasan tertentu alasan tertentu.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Tachibanaki, Toshiaki dan Kunio, Urakawa. *Nihon no Hinkon Kenkyū: Seikatsuhogoseido no hinkonsakugenkōka* (Tokyo: 2006), hlm.111

Bantuan tunai dapat berupa pemberian bantuan bahan pangan atau sejumlah uang tunai. Berikut ini adalah persentase jumlah penerima *seikatsuhogo* berdasarkan struktur keluarga dalam populasi Jepang.

**Tabel 14 Jumlah penerima bantuan *seikatsuhogo* berdasarkan struktur keluarga dalam populasi penduduk Jepang**

Tahun	Total	Lansia	<i>Boshi</i> · 母子 ( <i>single mother</i> )	Lain-lain (%)
1975	100,0	34,3	9,5	56,3
1985	100,0	32,5	14,4	53,1
1995	100,0	43,7	8,6	47,8
2000	100,0	46,0	7,8	46,2
2002	100,0	46,3	8,6	45,0
2003	100,0	46,4	8,7	44,9

Keterangan : Lain-lain: bantuan untuk orang yang mengalami kecelakaan dan orang-orang cacat.

SUMBER : Departemen Kesejahteraan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Buruh “Laporan Dinas Pemerintahan Kesejahteraan Masyarakat” dan Biro statistik Jepang “Gerakan Kesejahteraan Rakyat” tahun 2005

Data di atas menunjukkan bahwa persentase penerima *seikatsugoho* yang paling besar adalah kaum lansia dan pada tahun 2003 jumlahnya hampir mencapai setengah dari penduduk lansia di Jepang, yaitu 46,4% dari total penduduk lansia Jepang (19,2%).

Berdasarkan laporan biro statistik Jepang pada tahun 2005, pada pertengahan tahun 1980-an jumlah orang yang menerima bantuan *seikatsuhogo* semakin berkurang dari sekitar 1.500.000 orang pada tahun 1985 menjadi sekitar 1.000.000 orang pada tahun 1990. Ada dua alasan jumlah penerima bantuan *seikatsuhogo* berkurang, yaitu keadaan ekonomi yang baik pada pertengahan tahun 1980-an dan aturan atau persyaratan sistem *seikatsugogo* yang semakin ketat dengan pemeriksaan pendapatan yang semakin transparan dan ketat. Akan tetapi, setelah tahun 1990-an, jumlah penduduk yang menerima *seikatsuhogo* semakin meningkat menjadi 1.340.000 orang pada tahun 2003.<sup>78</sup>

<sup>78</sup> *Ibid.*, 112

Dalam kenyataannya, masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa terlalu berharap kepada pemerintah dalam hal perumahan dan kesejahteraan karena pada kenyataannya terdapat sejumlah restriksi (pembatasan dengan berbagai persyaratan) yang mempersulit perolehan program-program kesejahteraan, seperti program jaminan sosial<sup>79</sup>, termasuk program perlindungan hidup (*seikatsuhogo* • 生活保護). Selain penyusutan kuantitatif akan program kesejahteraan ini, orang-orang yang berpenghasilan rendah telah mengalami perlakuan eksklusif<sup>80</sup> yang menyebabkan mereka rentan menjadi *homeless*.<sup>81</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Jepang dan Hukum Kesejahteraan Sosial, pemerintah menjamin standar hidup bagi seluruh orang Jepang yang tanpa diskriminasi dan orang miskin tersebut dapat menuntut bantuan dari pemerintah (Kenneth dan Iwata 2003: 63). Di Tokyo, jika orang miskin mengajukan *seikatsuhogo* ke kantor pemerintah setempat dan diterima, mereka akan mendapat 80.000 yen per bulan. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak setiap orang miskin dapat menikmati bantuan ini karena petugas sangat ketat dalam menyalurkan dana.

Sejak akhir perang dunia kedua, kebijakan jaminan sosial Jepang ditujukan pada satu unit keluarga atau per kepala keluarga, yang berarti bahwa mereka yang hidup sendiri diabaikan dari program tersebut. Pada tahun 1980 program perumahan memiliki eligibilitas (sifat memenuhi syarat) yang diperuntukkan bagi orang-orang yang hidup sendiri, tetapi dalam prakteknya program ini hanya berlaku bagi wanita-wanita setengah tua dan tua (K. Nomura, 1990). Selain itu, para orang tua laki-laki yang hidup sendiri juga dieksklusif dari program jaminan sosial karena dalam kenyataannya hanya berlaku bagi keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga yang lumpuh, tua, dan keluarga yatim (ibu sebagai tulang punggung keluarga) (Soeda 1988). Agar bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan, orang tua laki-laki yang hidup sendiri harus memiliki

---

<sup>79</sup> Program bantuan kesejahteraan dari pemerintah untuk membantu para kaum miskin, pengangguran, orang sakit, lansia, dan lain-lain.

<sup>80</sup> Tidak dimasukkan atau dikeluarkan.

kondisi tubuh yang sakit parah dan tidak bisa bekerja lagi dan berusia lebih dari 65 tahun. Oleh karena itu, kalau laki-laki tua tersebut masih memiliki tubuh yang sehat dan tidak bercacat, tidak bisa menerima program ini bahkan ketika mereka secara hukum memenuhi syarat, mereka juga mengalami kesulitan (Bitô, Kinoshita, dan Nakagawa 2000). Mayoritas *homeless* yang berusia 50-65 tahun dan memiliki kesulitan dalam menemukan pekerjaan tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan ini.

Selain itu, mereka yang tidak memiliki KTP (*Jûminhyô* • 住民票) tidak dapat menerima asuransi pengangguran maupun program perlindungan hidup. Keadaan ini memang tidak adil, khususnya bagi para buruh harian yang sangat membutuhkan bantuan ini.<sup>82</sup>

Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah telah membatasi kesempatan bagi para kaum miskin, khususnya para laki-laki tua sebagai konsumen program-program yang telah dibuatnya. Ini merupakan salah satu alasan yang menyebabkan jumlah *homeless* di Jepang semakin meningkat di Jepang, sebab pemerintah tidak mencegah mereka sebelum menjadi *homeless*.

### 3.6.2 Kebijakan Perumahan

Sebagaimana telah dikatakan oleh Yoshihiro Okamoto<sup>83</sup> dalam tulisannya yang berjudul *Homelessness and housing in Japan* (2004)<sup>84</sup>, pemerintah pusat Jepang dianggap tidak bertanggungjawab dalam masalah perumahan. Hampir semua perumahan dibangun oleh perusahaan swasta sehingga jumlah perumahan publik pemerintah (*kôkyôjyûtaku* • 公共住宅) menjadi berkurang dan persyaratannya pun semakin ketat. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang dapat memperoleh tempat tinggal dalam perumahan publik pemerintah. Akan tetapi, masih ada cara lain untuk memperoleh tempat tinggal, yaitu dengan bekerja di suatu perusahaan

---

<sup>82</sup> Masami, Iwata. *Hômuresu/Gendai Shakai/Fukushi Kokka-“Ikiteiku Basho wo Megutte* (Tokyo, 2005), hlm.238.

<sup>83</sup> Seorang Profesor dari Universitas Chukyo yang ahli dalam bidang perumahan dan kesejahteraan.

<sup>84</sup> Okamoto et al, 2004 : 5.

yang dapat memberikan mereka bantuan jaminan dari perusahaan. Hal ini berarti, jika mereka kehilangan pekerjaan mereka, mereka juga akan kehilangan bantuan tersebut. Jadi untuk memperoleh tempat tinggal, mereka harus memiliki pekerjaan. Sementara itu, untuk mendapatkan pekerjaan, diperlukan sebuah KTP (*Jûminhyô* · 住民票). Bagi para *homeless* yang tidak memiliki KTP karena tidak memiliki alamat rumah akan susah untuk mencari pekerjaan, sehingga kondisi ini semakin memperburuk keadaan mereka dan sulit untuk keluar dari lingkaran *homeless*.<sup>85</sup>

Selain itu, sistem penyewaan apartemen sangat mempersulit orang miskin untuk tinggal karena untuk bisa menyewa apartemen mereka harus membayar sewa untuk 2 bulan ke depan kepada pemilik apartemen. Jika tidak memiliki penjamin (*hoshônin* · 保証人), mereka hanya dapat menyewa sebuah kamar sewaan harian (*doya*), tetapi biayanya masih terhitung mahal yaitu 2000-2500 yen per malam. Tentu saja hal ini semakin mempersulit orang miskin untuk memperoleh tempat tinggal, sehingga pada akhirnya rentan mengalami *homeless*.<sup>86</sup> Semua hal ini merupakan aturan birokrasi yang harus dipenuhi, sehingga jika tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, mereka tidak akan bisa mendapatkan yang mereka butuhkan.<sup>87</sup>

### 3. 7 Respon Pemerintah

Orang miskin dalam masyarakat Jepang semakin banyak. Oleh karena itu, untuk merealisasikan suatu negara yang makmur, masalah kemiskinan tidak boleh dianggap sebagai suatu masalah individu melainkan suatu masalah sosial yang harus ditangani bersama. Dengan demikian, masalah kemiskinan harus diamati kembali sebagai masalah sosial yang dipandang secara logis dan penuh perhatian. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peranan pokok dalam meresponi masalah kemiskinan yang terjadi di Jepang, khususnya dalam masalah *homeless*. Kondisi

<sup>85</sup> Masami, Iwata *op.cit.*, hlm.121.

<sup>85</sup> *Ibid.*,234

*homeless* sebagai salah satu bentuk kemiskinan merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menuntut pemecahan.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang tidak akan bisa terhapuskan secara total dari lingkungan masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pendahuluan bahwa keberadaan kaum miskin, termasuk para *homeless*, telah memperbesar kesenjangan yang telah terjadi di Jepang. Sementara itu, sekali kesenjangan terbentuk, akan cenderung berlanjut dalam periode yang panjang dan akan lahir kembali. Ini merupakan siklus kemiskinan yang tidak bisa terelakkan.

Namun, dalam hal meresponi masalah *homeless* sebagai salah satu bentuk kemiskinan, pemerintah telah melakukan beberapa langkah-langkah tindakan guna mengurangi dan menghindari pertumbuhan jumlah *homeless*. Berikut ini merupakan serangkaian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lokal Tokyo dan pemerintah Jepang dari tahun 1990-an dalam meresponi masalah *homeless* di Jepang:

- 1992 : TMG (*Tokyo Metropolitan Government*) menampung para *homeless* yang ada di seluruh Tokyo ke dalam penampungan musim dingin yang ditujukan untuk para buruh harian San'ya.
- 1993 : Pada bulan Desember, TMG meminta kepada manajer Kesejahteraan untuk mengakannya konferensi dan bertemu dengan para *homeless*.
- 1999 : Pada bulan Februrari pemerintah pusat membentuk *Konferensi Liaison* untuk masalah *homeless*, dan pada bulan Mei mengumumkan "Tindakan Secepatnya untuk Menangani Masalah *homeless*," yang berpusat pada pusat-pusat tunjangan makanan. Pada bulan Juli, Departemen Kesejahteraan membentuk *workshop* mengenai tunjangan makanan untuk para *homeless* untuk mempelajari kebijaksanaan dan gejala-gejala *homeless*.
- 2003 : Pada bulan Januari-Februari, diadakan penelitian di seluruh Jepang sebagai aksi bantuan untuk para *homeless*. Kemudian pada bulan Juli,

pemerintah mengumumkan kebijakan nasional untuk masalah sosial ini. Berikut ringkasannya:

1. Pekerjaan (aktivitas advokasi dengan para penyedia lapangan pekerjaan; penyediaan informasi pekerjaan dan konseling; proyek pengenalan pekerjaan percobaan; *job training*; dan promosi keterlibatan organisasi swasta).
2. Tempat tinggal (alokasi perumahan umum untuk para *homeless* dengan jumlah yang lebih banyak; penyediaan informasi mengenai rumah swasta yang disewakan dan perusahaan-perusahaan penjamin).
3. Layanan kesehatan dan medis (menyediakan layanan, konseling, penyerahan ke kantor-kantor layanan kesejahteraan, dan layanan lainnya oleh pusat kesehatan; hukum pengadaan bantuan medis; dan kerjasama organisasi-organisasi swasta dan daerah setempat).
4. Konsultasi dan pengajaran (pengadaan konseling dan jaringan pengajaran fasilitas kesejahteraan; konseling ke jalanan dan penyerahan ke pusat pelayanan yang tersedia)
5. Proyek bantuan makanan dan proyek lain untuk memenuhi kebutuhan individu, seperti penampungan sementara, makanan, pemeriksaan medis, dan konseling pekerjaan dan pengaturan hidup sehari-hari).
6. Bantuan ke tempat-tempat yang banyak terdapat *homeless* (penyediaan penampungan dan konseling pekerjaan; pelatihan kemampuan dan pekerjaan percobaan untuk para buruh harian; konseling ke jalanan dan penyerahan ke pusat pelayanan yang tersedia).
7. Langkah emergensi dan perlindungan hidup (kesejahteraan bagi individu yang membutuhkan perawatan medis secepatnya).
8. Perlindungan hak asasi manusia
9. Perbaikan lingkungan (patroli dan pengambilalihan taman dan tempat-tempat publik lainnya).
10. Keamanan lingkungan (batuan patroli dan kepolisian)
11. Kerjasama dengan organisasi swasta
12. lain-lain

Meskipun telah ada respon pemerintah dalam menangani masalah *homeless*, kebijakan-kebijakan tersebut masih terbatas, khususnya dalam penyediaan kesempatan kerja. Hal ini tentu saja berkaitan dengan masalah ekonomi Jepang yang saat ini sedang menalami resesi.<sup>88</sup>

Untuk mendorong kemandirian bagi para *homeless*, di Tokyo, mulai tahun 2004 selama 2 tahun diberikan sewa rumah murah melalui program *homuresu chiiki seikatsu igyou shien juugyou*「ホームレス地域生活移行支援事業」. Akan tetapi kemandirian mereka hanya tercapai 10 %. Ini berarti bahwa program tersebut tidak berjalan dengan baik.<sup>89</sup>

Selain usaha penanganan di atas, pemerintah Jepang juga bekerja sama dengan organisasi non profit (NPO), yaitu organisasi yang menggerakkan tenaga sukarelawan untuk membantu menangani masalah-masalah sosial termasuk masalah *homeless*. Saat ini, NPO semakin berkembang di Jepang. Hal ini lah yang dianggap sebagai salah satu penyebab jumlah orang miskin di Jepang terhitung sedikit dibanding negara maju lainnya. Dengan berkembangnya organisasi seperti ini, orang-orang yang tidak mampu seperti *homeless* dapat terbantu.

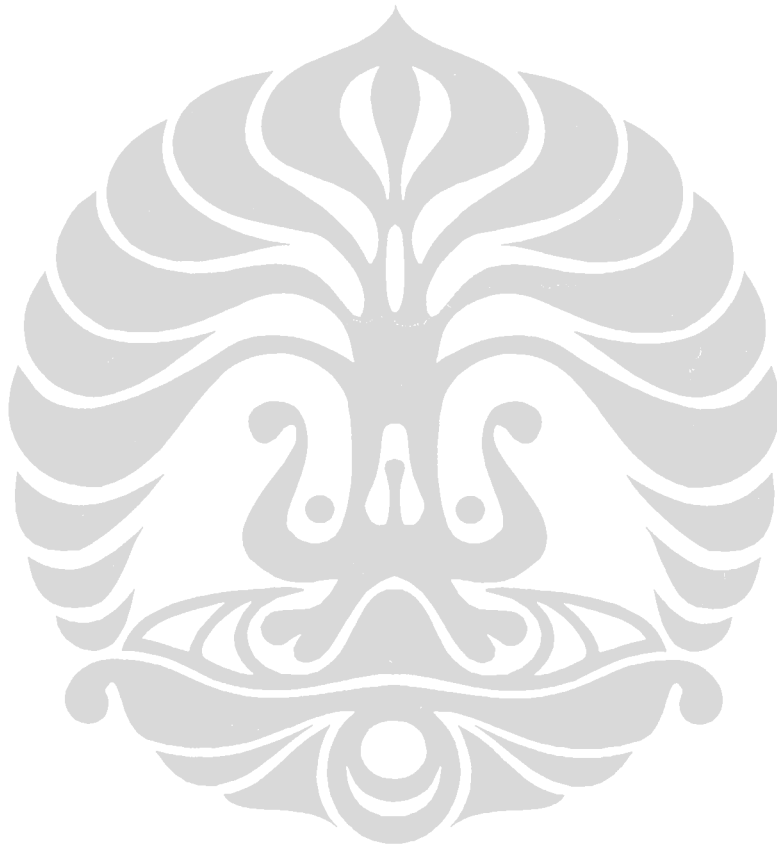
Mengingat bahwa pembangunan masyarakat termasuk pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka reorientasi kebijaksanaan yang dimaksud dapat dimulai dari lingkup pembangunan nasional. Mengingat kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat, orang-orang termasuk pemerintah mulai berfikir untuk mencari model pembangunan alternatif disamping strategi konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan ekonomi tidak lagi dapat dianggap sebagai obat mujarab yang dapat menghapus kantong-kantong kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tidak identik dengan lenyapnya kemiskinan. Sesuai dengan pernyataan The Kian Wie (1981 a: 103) bahwa

<sup>88</sup> Miki, Hasegawa, *We Are Not Garbage! The Homeless Movement in Tokyo, 1994-2002*. (Routledge New York & London, 2006), hlm.159-163.

<sup>89</sup> Mainichi Shimbun 毎日新聞 2007年4月21日付朝刊6面



pertumbuhan ekonomi memang merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi (*necessary condition*), tetapi belum merupakan suatu syarat yang mencukupi (*sufficient condition*) bagi terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi. Faktor non ekonomi, seperti faktor sosial, peraturan atau kebijakan pemerintah serta respon pemerintah merupakan faktor lain yang juga memiliki peran penting sebagai variabel yang relevan untuk menangani suatu masalah kemiskinan, termasuk *homeless*.





## BAB 4 KESIMPULAN

Jepang adalah sebuah negara maju yang ternyata tidak lepas dari kantong kemiskinan. Munculnya *homeless* merupakan salah satu bentuk kemiskinan di Jepang. Dilihat dari sudut pandang *homeless*, kondisi perekonomian sangat mempengaruhi keadaan *homeless*. Tentu saja karena kondisi ekonomi sangat mempengaruhi kesejahteraan hidup seseorang dan sangat berdampak pada kehidupan sosial. Sebelum tahun 1990-an, keberadaan *homeless* di Jepang tidak terlalu tampak ke permukaan karena jumlahnya yang terhitung sedikit, tetapi setelah pecahnya gelembung ekonomi pada awal tahun 1990-an dan resesi ekonomi yang berkepanjangan, jumlah *homeless* semakin meningkat dan telah tampak ke permukaan. Kaum *homeless* ini berasal dari tiga komunitas besar, yaitu kaum buruh harian *yoseba*, pekerja reguler, dan pekerja non reguler.

Munculnya *homeless* dari kaum buruh harian di *yoseba* disebabkan oleh struktur industri di Jepang yang menempatkan buruh harian sebagai golongan pekerja paling bawah atau golongan yang termarginalisasi, sehingga oleh struktur ini mereka harus menerima kenyataan sebagai kelompok yang status pekerjaannya tidak stabil dan gaji yang relatif kecil. Kesempatan kerja bagi para buruh harian

di *yoseba* juga semakin berkurang dengan semakin berkurangnya jumlah industri sekunder yang menyerap lebih banyak buruh harian.

Kemudian, munculnya *homeless* dari kalangan pekerja reguler dan pekerja non reguler dipengaruhi oleh struktur perusahaan Jepang yang mengalami transformasi akibat restrukturisasi (*risutora*). Sistem tenaga kerja tradisional Jepang, yaitu sistem *shūshinkoyō* dan sistem *nenkojoretsu* telah mengalami kelunturan dengan semakin banyaknya jumlah pekerja non reguler dan semakin berkurangnya pekerja reguler. Oleh karena itu, status pekerjaan para pegawai dalam perusahaan Jepang, baik pekerja reguler maupun pekerja non reguler menjadi tidak stabil dan rentan mengalami pemberhentian kerja.

Selain itu, terdapat pula faktor non ekonomi yang memperburuk keadaan *homeless*, yaitu adanya berbagai pembatasan dalam perolehan jaminan perlindungan hidup dan adanya kebijakan dan aturan yang ketat dalam hal perumahan yang semakin memperkecil kemampuan untuk memenuhi kebutuhan papan. Hal ini menyebabkan orang yang sangat miskin tereksklusi dari program bantuan pemerintah.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa munculnya *homeless* yang berasal dari ketiga komunitas tersebut di atas bukan disebabkan oleh kemalasan individu dan bukan juga disebabkan oleh kebudayaan kemiskinan yang diwariskan dari orang tua mereka atau '*homeless* turunan', melainkan karena kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh struktur ekonomi maupun non ekonomi. Rendahnya penghasilan buruh harian *yoseba*, meningkatnya jumlah pekerja non reguler, meningkatnya angka pengangguran, dan berkurangnya kesempatan kerja bagi orang yang sudah tua, serta kurangnya jaminan keamanan sosial merupakan dampak-dampak dari struktur yang sedang berjalan dalam negara Jepang, yang disebut sebagai struktur ekonomi dan struktur non ekonomi. Jadi, sesuai dengan asumsi awal bahwa munculnya *homeless* di Jepang merupakan akibat dari kemiskinan struktural, dapat dikatakan bahwa *homeless* di Jepang merupakan salah satu bentuk kemiskinan struktural.

## BIBLIOGRAFI

### Bahan Buku

- Aoki, Hideo. 2006. *Japan's Underclass: Day Labourers and the Homeless*. Melbourne: Trans Pacific Press
- Blank, R M. 2003. *Selecting Among Anti-Poverty Policies: Can an Economics Be both Critical and Caring?* Review of Social Economy
- Enzo, Mingione. 1996. *Urban Poverty and the Underclass*. USA
- Gill, Tom. 2001. *Men of Uncertainty-The Social Organization of Day Laborers in Contemporary Japan*. State University of New York
- Hasegawa, Miki. 2006. *We Are Not Garbage! The Homeless Movement in Tokyo, 1994-2002*. Routledge New York & London
- Hasegawa, Takahiko. 2005. *OECD Shokoku ni okeru Hômaresu no Teigi oyobi Monitaringu ni kansuru Chôsa*. Tokyo
- Hômaresu to sumai no kenri*. 2004. Jyûtakuhakusho 2004-2005. Nihon Jyûtakukaigiron. Domesu Shuppan
- Ito, Takatoshi. 1993. *The Japanese Economy*. London
- Iwai, Katsuto. 2003. *Kaisha ha Korekara Dounarunoka*. Japan: Heibonsha Book
- Iwata, Masami. 2005. *Hômaresu/Gendai Shakai/Fukushi Kokka-“Ikiteiku Basho wo Megutte*. Tokyo
- 2007. *Gendai no hinkon-wâkingupuâ-hômaresu-seikatsuhogo*. Tokyo: Chikuma Shinsho
- Jencks, C. 1996. *Can we replace welfare with work? In M. R. Darby (Ed.), Reducing Poverty in America*. Thousand Oaks: Sage
- Kawakami, Masako. 2005. *Nihon ni okeru Hômaresu no Jôtai*. Tokyo: Gakumonsha
- Kingston, Jeff. 2004. *Japan's Quiet Transformation Social Change and Civil Society in the Twenty-first Century: Social Transformations- Family, gender, aging, and work*. London and New York: Routledge Curzon Taylor and Francis Group
- Kornblum, William dan Joseph Julian. 1992. *Social Problems: Poverty Amid Affluence*. USA: A Simon & Schuster Company

- Kumazawa, Makoto. 2003. *Restra and work-sharing* (Jepang: Iwanami Book berdasarkan JIL (Lembaga Ketenagakerjaan Jepang), laporan penelitian tahun 2002
- Masuda, Akitoshi. 2003. *Fukyô!! Tôkyô Rôjô Sabaibaruu Hômuresu, 28 Nin no Rirekisho*. Tokyo
- Milly, J Deborah. 1999. *Poverty, Equality, and Growth: The Politics of Economic Need in Postwar Japan*. USA
- Nakayama, Tooru. 2002. *Nojukuseikatsusha mondai, jittai to jiritsushien*. Osakafu shiritsudaigaku: shakaifukushigakubu
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah-Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia
- Roger, Burrows, dkk. 1997. *Homelessness and Social Policy*. London and New York
- Shakaifukushihônin. 2006. *Hômuresuseikatsu wo Keikenshitahitotachi no Shukishû*. Ôsakafushakaifukushikyôgikai
- Sômushô Tôkei Kyoku. 2002. *Rôdôryoku Chôsa Hôkoku 2002nendo* (総務省統計局. 労働力調査報告) 2002年度. Tokyo
- Tachibanaki, Toshiaki dan Kunio, Urakawa. 2006. *Nihon no Hinkon Kenkyû: Seikatsuhogoseido no hinkonsakugenkôka*. Tokyo
- Tsuru, Kotaro. 1995. *The Japanese Market Economy System: It's Strengths and Weaknesses : The Changing Production Keiretsu and Distribution System-the Vertical Interfirm Relationship*. Tokyo: Kondansha
- Thee Kian Wie, *Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan: Beberapa Pemikiran tentang Pertumbuhan Ekonomi* (Sinar Harapan, 1981)

**Sumber dari Jurnal dan Surat Kabar**

*Hirogaru Kakusa Bunretsu Kasoku*. Asahi Shimbun. Kamis, 12 April 2007, hlm. 8

Mainichi Shimbun 毎日新聞 2007年4月21日付朝刊 6面

Social Science Japan Journal Vol.10, No. 2, pp 293-299 2007, September 14 2007

**Sumber dari Internet:**

Kôseirôdôshô. Hômuresu no Jittai ni kansuru Zengoku Chôshahôkoku.

<http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/03/h0326-5.html> (akses 22 Februari 2008)

Swenson, Tamara. 2002. *Framing Homelessness: Changing Representations in Japanese Media* (Osaka Jogakuin College).

<http://jcomm.uoregon.edu/~IAMCR-PolEcon/Swenson.Visgatis.html>.  
(akses 10 Maret 2008)

Statistic Bureau. 3-16 第 3-16 表雇用創出率・雇用喪失率・雇用再分配率・雇用純増率. Table 3-16: Job creation rates, job destruction rates, job redistribution rates and job net increase rates.

[www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/03/3-16.xls](http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/03/3-16.xls) (akses 1 Juni 2008)

## LAMPIRAN

1. Kondisi Hunian *Homeless* di Jepang

Foto 1 Kardus dan Terpal Biru berjejer  
(Stasiun Kereta, Tokyo, 2008)



Foto 2 Tenda Biru di sebuah taman dekat  
kuil Asakusa (Tokyo, 2008)

## 2. Kondisi Mobilitas



Foto 4 Bekerja di siang hari dengan  
mencari barang rongsokan  
(Tokyo, 2008)



Foto 3 Di malam hari mencari tempat  
untuk tidur (*Homeless* wanita  
dengan barang-barangnya  
(Tokyo, 2008)

### 3. Tempat Tinggal



Foto 6 *Homeless* di taman (Kyoto, 2008)



Foto 5 *Homeless* di pinggir jalan (Hiroshima, 2008)



Foto 8 *Homeless* di pinggir sungai (Kyoto, 2008)



Foto 7 *Homeless* di stasiun kereta (Tokyo, 2008)



Foto 9 Kumpulan *homeless* di taman (Tokyo, 2008)

\*(Foto oleh Santi Sitorus, Jepang, 2008)



#### 4. Gambar *Yoseba*



**Foto 10 *Yoseba* di Kotobuki**

Sumber: Foto oleh Umetani Hideji, 1994) dalam buku Gill, Tom. 2001. *Men of Uncertainty-The Social Organization of Day Laborers in Contemporary Japan*. State University of New York, hlm 0



**Foto 11 Airin : *Yoseba* di Kamagasaki**

Sumber: Foto oleh Nakajima Satoshi, 1994. *ibid.*, 96

## 5. Contoh Kasus Pengalaman *Homeless*

### 1. Kasus *Homeles* dari Buruh Harian *Yoseba*

Berikut ini adalah pengalaman *homeless* berdasarkan hasil wawancara Tom Gill dalam bukunya yang berjudul *Men of Uncertainty*.

Tom Gill bertemu dengan Kuriyama-san pada Januari tahun 1994. Kuriyama-san telah berada di Kotobuki (salah satu *yoseba* di Yokohama) sejak enam bulan sebelumnya setelah diusir dari rumah orangtuanya karena sampai umur 40 tahun masih tinggal di rumah orangtuanya. Beliau akhirnya mendapatkan pekerjaan di Kotobuki sebagai buruh harian dengan gaji yang relatif kecil, yaitu 10.000 per hari kerja dan belum termasuk biaya transportasi ke tempat proyek konstruksi. Beliau mengatakan sering mengalami pemerasan atau eksploitasi di tempat proyek oleh para *yakuza* yang disebut sebagai *oyabun* oleh para buruh harian. Karena tidak tahan, akhirnya beliau keluar dari *yoseba* dan menjadi *homeless*.

Kuriyama-san merupakan salah seorang golongan yang termarginalisasi karena berada pada struktur terendah dalam industri bahkan sering dianggap berada di luar struktur industri.<sup>90</sup>

### 2. Kasus *Homeles* dari Pekerja Non Reguler

Berikut ini merupakan kisah seorang *homeless* di Osaka, bernama Tanaka-san yang diambil dari sebuah buku kumpulan tulisan (*bunshû* · 文集) pengalaman para *homeless* yang terdapat di Osaka melalui kunjungan yang dilakukan oleh dinas kesejahteraan sosial, pemerintah Osaka.

Dalam tulisannya, Tanaka-san menceritakan kisah hidupnya sampai akhirnya beliau menjadi seorang *homeless* dan bagaimana beliau menjalani kehidupan *homeless*. Beliau sendiri tidak mengerti mengapa mengalami kehidupan *homeless*. Sekalipun telah berusaha keras bekerja, tetapi karena gaji berkurang hidupnya

---

<sup>90</sup> Tom, Gill, *Men of Uncertainty-The Social Organization of Day Laborers in Contemporary Japan* (State University of New York, 2001), hlm.144-146.

menjadi berkekurangan dan bahkan sampai dililit hutang. Uang yang beliau terima dari pekerjaan *arubaito* telah habis begitu saja untuk membayar hutang. Setelah itu, beliau bercerai dan hidup sendiri. Pada tahun 1998 (di saat krisis ekonomi yang melanda Asia termasuk Jepang), segala sesuatu, khususnya perekonomian mengalami kebangkrutan, sehingga kehidupannya semakin memburuk. Karena tidak sanggup lagi membayar biaya sewa kamar, beliau diusir dari apartemen. Akhirnya beliau tinggal di taman dan hidup sebagai seorang *homeless*. Agar bisa makan beliau mengumpulkan sampah aluminium dan tembaga, menjualnya dan mendapatkan sedikit uang. Selama mengalami kehidupan *homeless*, berkali-kali beliau jatuh bangun, bahkan merasa sangat menderita dan ingin mati, tetapi Tanaka-san telah menjadi terbiasa dengan kehidupan *homeless*.<sup>91</sup>

### 3. Kasus *Homeles* dari Pekerja Reguler

Berikut ini adalah pengalaman salah seorang *homeless* berdasarkan hasil wawancara Masuda Akitoshi terhadap 28 orang *homeless* di Tokyo dalam bukunya yang berjudul *Fukyô!! Tôkyô Rôjô Sabaibaruu Hômuresu, 28 Nin no Rirekisho*.

Fukazawa Kenji (深沢賢治) berusia 54 tahun merupakan lulusan salah satu perguruan tinggi swasta yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi sebagai pekerja reguler. Awalnya perusahaan berjalan dengan lancar, tetapi sejak masa krisis ekonomi, kondisi menjadi memburuk. Untuk mengurangi biaya, perusahaan melakukan kebijakan dengan mengurangi jumlah para pegawai tua sebagai salah satu objek restrukturisasi yang dianggap menghabiskan banyak pengeluaran sebagai akibat dari penerapan *shûshinkoyô*. Pada tahun 1996, perusahaan tersebut mengurangi pegawai tua yang berusia 50-an ke atas sekitar 20%. Fukuzawa Kenji termasuk salah seorang objek restrukturisasi perusahaan yang berhenti bekerja saat beliau berusia 52 tahun. Selama 1 tahun beliau masih

---

<sup>91</sup> Shakaifukushihônin. *Hômuresuseikatsu wo Keikenshitahitotachi no Shukishû*. Ôsakafushakafukushikyôgikai (Osaka, 2006), hlm. 4-15.

menerima asuransi pengangguran dari perusahaan, tetapi pada tahun berikutnya jumlah asuransi tersebut semakin berkurang dan akhirnya tidak menerima sama sekali. Tentu saja beliau berusaha mencari pekerjaan, tetapi karena usianya yang terhitung sudah non produktif, sulit baginya untuk memperoleh pekerjaan. Saat ini perusahaan lebih memilih para pegawai muda yang lebih produktif. Oleh karena tidak adanya sumber penghasilan hidup, Fukuzawa-san tidak mampu lagi membayar sewa apartemen, sehingga beliau memutuskan untuk tinggal di taman Ueno, Tokyo dan menjadi *homeless*.<sup>92</sup>

#### 4. Kasus *homeless* yang berasal dari pekerja reguler yang menjadi pekerja non reguler

Berikut ini adalah kisah seorang *homeless* yang awalnya merupakan seorang pekerja yang mapan, tetapi kemudian kehilangan pekerjaan dan terakhir bekerja sebagai pekerja arubaito. (Hasil wawancara Masuda Akitoshi dalam bukunya yang berjudul *Fukyô!! Tôkyô Rôjô Sabaibaruu Hômuresu, 28 Nin no Rirekisho*).

Murase Yukiharu (村瀬幸治) berusia 56 tahun, seorang lulusan perguruan tinggi terkenal yang awalnya bekerja sebagai pekerja staff manajerial di sebuah perusahaan mesin. Pada usia 27 tahun beliau menikah dan kemudian memiliki dua orang anak. Pada usia 33 tahun beliau juga berhasil memiliki jabatan sebagai kepala bagian salah satu departemen perusahaan. Awalnya kehidupan keluarga mereka berjalan dengan baik, tetapi karena ada masalah, istrinya meminta mereka bercerai. Rumah yang mereka tempati adalah rumah orang tua istrinya, sehingga Murase-san lah yang harus keluar dari rumah tersebut dan kemudian tinggal di asrama perusahaan. Masalah Murase-san ternyata tidak sampai di situ, saat telah berusia 49 tahun, beliau menjadi korban *risutora* dan diberhentikan dari kerja karena perusahaan mengalami kemerosotan. Perusahaan melakukan *risutora* dengan memindahkan perusahaan bagian produksi ke luar negeri dan lebih banyak mempekerjakan lulusan terbaru perguruan tinggi. Setelah itu beliau mencari kerja

---

<sup>92</sup> Masuda, Akitoshi. *Fukyô!! Tôkyô Rôjô Sabaibaruu Hômuresu, 28 Nin no Rirekisho* (Tokyo, 2003), hlm. 194-200.

dan lagi-lagi mengalami pemberhentian kerja karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Beliau memang mendapatkan uang pemberhentian kerja (*taishokukin* • 退職金) dan asuransi pengangguran dari perusahaan tetapi hanya bisa memenuhi kebutuhan satu sampai dua tahun, apalagi beliau juga harus membantu membayar uang kuliah anaknya. Karena usianya yang semakin menua, beliau mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan di perusahaan. Kemudian beliau mendapatkan pekerjaan *arubaito* yang gaji per jamnya hanya 900 yen atau dalam sebulan sekitar 130.000 yen. Penghasilan sekecil itu hanya bisa membayar sewa kamar apartemen dan tidak bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Keadaannya menjadi semakin sulit setelah beliau menginap encok parah hingga tidak bisa bekerja lagi. Karena sewa kamar apartemen selama 3 bulan tidak dibayar, beliau diusir dan akhirnya menjadi seorang *homeless* yang tinggal di suatu taman kota di Tokyo.

Dari kisah *homeless* yang dialami kelompok orang tua di atas, dapat dianalisa bahwa struktur yang dimaksudkan dalam kasus ini adalah pengaturan sistem kepegawaian dengan mengurangi akses para pegawai yang sudah tua dalam memperoleh kesempatan kerja.<sup>93</sup>

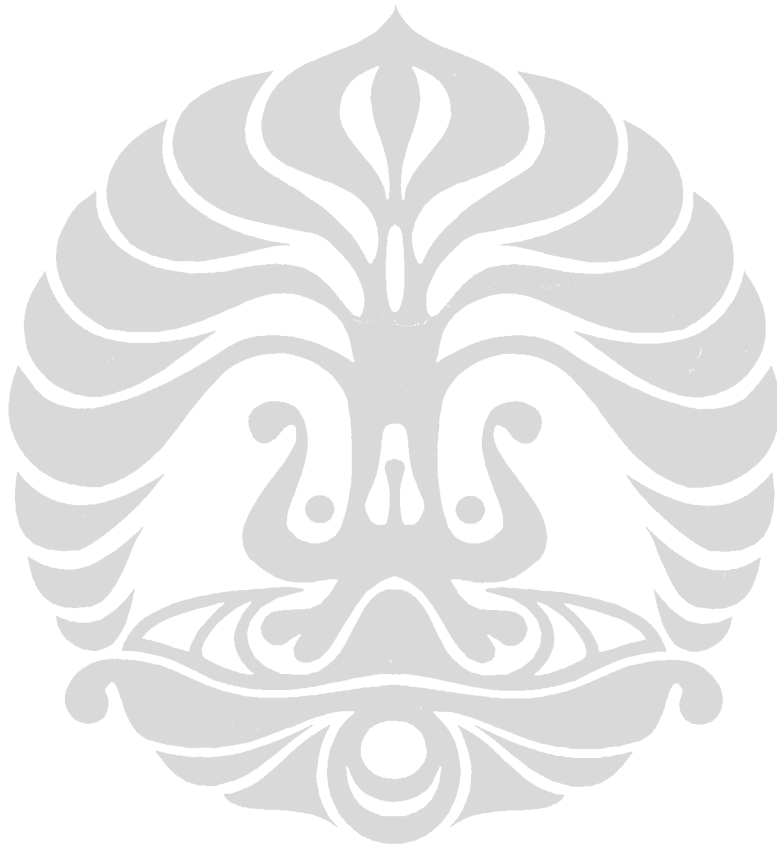
##### 5. Kisah *homeless* yang berasal dari seorang *furiita*

Berikut ini adalah kisah pengalaman *homeless* yang berasal dari seorang *furiita* yang juga diambil dari buku hasil wawancara Masuda Akioshi. Sugimoto Takafumi (杉本隆文), berusia 29 tahun memulai kehidupan *homeless* sejak tahun 2002. Setelah lulus dari SMA di daerah Gunma-ken, dia pindah ke Tokyo dan bekerja di sebuah perusahaan manufaktur. Akan tetapi, setelah bekerja dua tahun, dia akhirnya berhenti kerja karena tidak menyukai pekerjaannya (pekerjaan 3K). Setelah itu, dia menjadi seorang *furiita* dan telah mencoba sampai 40 kali mengirim lamaran, tetapi hanya 5 perusahaan yang menerima sampai ke tahap wawancara akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan. Selama 8 tahun dia telah melewati kehidupan *furiita* dan telah bekerja di berbagai pekerjaan *part time*.

---

<sup>93</sup> Masuda, Akioshi. *Fukyô!! Tôkyô Rôjô Sabaibaruu Hômuresu, 28 Nin no Rirekisho* (Tokyo, 2003), hlm. 78-85.

Sementara itu, apartemen tempat dia tinggal juga telah mengalami renovasi, sehingga dia harus keluar dari sana. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan mobil sebagai tempatnya untuk tidur. Pada malam hari dia tidur di mobil yang dia parkir di taman. Kalau ada patroli dia berpura-pura mabuk atau mengatakan “maaf, saya lagi tidak enak badan jadi ingin istirahat sebentar di sini.” Kemudian kalau sudah waktunya bekerja *baito*, dia menipkan mobilnya di tempat parkir dan berangkat ke tempat kerja naik kereta.<sup>94</sup>



---

<sup>94</sup> Masuda, Akitoshi. *Fukyô!! Tôkyô Rôjô Sabaibaru Hômuresu, 28 Nin no Rirekisho* (Tokyo, 2003), hlm. 111-118.

## DAFTAR ISTILAH

- Arubaito ・ アルバイト--- salah satu jenis pekerjaan non reguler, yaitu pekerjaan paruh waktu yang mayoritas adalah mahasiswa.
- Chiiki kakusa ・ 地域格差--- kesenjangan wilayah, yaitu perbedaan kesejahteraan antar wilayah dalam suatu negara.
- Chûryûkaikyû ・ 中流階級--- kelas menengah dalam stratifikasi sosial.
- Cultural of poverty --- kebudayaan kemiskinan, yaitu suatu teori yang dikemukakan oleh Oscar Lewis yang berarti kemiskinan yang telah membudaya, yaitu suatu pola-pola kebudayaan yang berlangsung lama dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi terbiasa terhadap cara hidup miskin. Sekali kebudayaan kemiskinan terjadi, itu akan cenderung ada terus-menerus yang diturunkan kepada keturunannya. Lewis hendak menjelaskan bahwa ada seperangkat nilai yang dianut oleh komunitas di mana saja yang menyebabkan komunitas itu sulit keluar dari lingkaran kebudayaan kemiskinan.
- Daiichijisangyô ・ 第一次産業---industri primer terdiri dari sektor agrikultur, kehutanan, dan perikanan.
- Dainijisangyô ・ 第二次産業---industri sekunder terdiri dari sektor manufaktur (seisan : 生産), konstruksi (kensetsugyô : 建設業), dan pertambangan.
- Daisanjisangyô ・ 第三次産業---industri tersier, yaitu dari sektor jasa yang terdiri dari jasa transportasi, komunikasi, usaha eceran, grosir, perbankan, keuangan, *real estate* (harta tidak bergerak), dan jasa administrasi.
- Disutora---berasal dari bahasa Inggris, yaitu ‘destruction’ yang berarti pembinasaaan pekerja (pengurangan tenaga kerja).
- Doya ・ ドヤ---sebutan untuk yado ・ 宿 atau rumah penginapan tempat para buruh harian tinggal dengan harga sewa kamar yang murah.
- Doya-gai ・ ドヤ街---daerah perumahan murah (kawasan *doya*) tempat para buruh harian tinggal.
- Fukushi kokka ・ 福祉国家---negara makmur, yaitu suatu negara yang sejahtera tanpa memiliki kantong-kantong kemiskinan di dalamnya.
- Furiitaa ・ フリーター---generasi muda yang berumur 15-34 tahun (tidak termasuk pelajar dan ibu rumah tangga), yang bekerja sampingan atau sebagai pekerja paruh waktu dan pengangguran yang berusaha untuk mencari pekerjaan.
- Furôsha ・ 浮浪者---istilah lama yang dipakai oleh orang Jepang untuk menyebut kaum *homeless*
- Gaikokurôdôsha ・ 外国人労働者---pekerja asing, yaitu pekerja dari negara asing yang bekerja di Jepang. Pada umumnya bekerja di bidang pekerjaan yang dikenal dengan istilah 3K yaitu, kitsui (sulit), kiken (berbahaya), dan kitanai (kotor), seperti pekerjaan konstruksi.
- Gakureki shakai ・ 学歴社会---masyarakat yang menjunjung tinggi latar belakang pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan terjamin.

- Gentrifikasi---tata kota, yaitu proses yang mengubah perumahan-perumahan murah menjadi perumahan-perumahan mahal, seperti kondominium, atau kompleks apartemen, dan tempat komersial lainnya untuk bisnis-bisnis yang melayani para langganan kelas menengah dan kelas menengah atas.
- Haken shain • 派遣社員--- pekerja temporer yang diutus oleh suatu agensi untuk bekerja di suatu perusahaan. Merupakan salah satu jenis pekerja non reguler yang sewaktu-waktu bisa diberhentikan dari pekerjaannya.
- Hinkon • 貧困---kemiskinan, yaitu suatu keadaan absolut maupun relatif tentang kekurangan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang muncul sebagai dampak dari hadirnya orang miskin
- Hiseishain • 非正社員--- pekerja non reguler atau pekerja tidak tetap yang bekerja hanya dalam waktu sementara (bukan pegawai tetap), misalnya *arubaito, paato, haken, keiyaku, rinji hiyatoi*.
- Hiyatoi rôdôsha • 日雇労働者---buruh harian yang bekerja kurang dari 30 hari. Merupakan salah satu jenis pekerja non reguler.
- Ho-muresu • ホームレス--- istilah modern untuk menyebutkan tuna wisma yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *homeless*.
- Hoshônin • 保証人---sebutan untuk orang yang menjadi penjamin sebagai persyaratan untuk dapat memperoleh sesuatu, misalnya untuk menyewa rumah.
- Jie • 自営---wiraswasta, yaitu salah satu jenis pekerjaan dengan usaha dan modal sendiri.
- Jôryûkaikyû • 上流階級--- kelas atas dalam stratifikasi sosial.
- Kaishayakuin 会社役員---anggota direksi, yaitu salah satu jenis atau posisi pekerjaan dalam suatu perusahaan.
- Kakusa shakai • 格差社会---masyarakat berkesenjangan, yaitu masyarakat yang memiliki kesenjangan atau perbedaan antara si kaya dan si miskin.
- Kamagasaki • 釜ヶ崎---nama *yoseba* di Osaka, sekarang disebut Airin.
- Karyûkaikyû • 下流階級---kelas bawah dalam stratifikasi sosial.
- Kasô shakai • 下層社会---masyarakat kelas bawah, yaitu masyarakat yang dalam stratifikasi sosial berada pada kelas paling bawah. Dalam bahasa Inggris disebut masyarakat *underclass*.
- Keieisha • 経営者---manajer, yaitu salah satu jenis pekerjaan atau posisi dalam perusahaan.
- Keiyaku shain • 契約社員---pekerja kontrak, yaitu pekerja yang memiliki keahlian khusus dan dikontrak oleh perusahaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan.
- Keizai kakusa • 経済格差---kesenjangan dalam hal ekonomi.
- Keizaikyôryokukikou • 経済協力機構---Organisasi untuk Kerjasama serta Pembangunan Ekonomi, yaitu suatu Organisasi negara-negara Industri Maju, salah satunya adalah Jepang.



- Kemiskinan struktural--- kemiskinan yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh struktur atau berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan baik dalam ekonomi, sosial, maupun politik.
- Kensetsukôzô ・ 建設作業従事者---sektor konstruksi, yaitu salah satu sektor industri.
- Kôkeiki no gekihinkon ・ 好景気の激貧困--- istilah untuk menyebut kemiskinan ekstrim, yaitu suatu keadaan individu atau masyarakat yang miskin sekali.
- Kôreika shakai ・ 高齢化社会---masyarakat menua, yaitu suatu masyarakat yang memiliki jumlah penduduk lanjut usia (yang berusia lebih dari 65 tahun) mencapai 7% dari jumlah penduduk keseluruhan.
- Kotobuki ・ 寿---salah satu *yoseba* terbesar di Jepang yang terdapat di Yokohama.
- Mikon ・ 未婚---belum menikah atau tidak menikah.
- Mushuku ・ 無宿---istilah untuk menyebutkan *homeless* pada zaman Tokugawa yang berarti tidak memiliki rumah tempat tinggal (*homeless*).
- Nenkôjoretsumu ・ 年功序列---suatu sistem pemberian gaji berdasarkan senioritas dan masa pengabdian seorang pegawai pada sebuah perusahaan.
- Nikkeiren ・ 日経連---Asosiasi Pengusaha Jepang.
- Nojukusha ・ 野宿者---istilah *homeless* yang sering dipakai oleh orang-orang Osaka, secara harfiah diartikan sebagai orang yang tidur di lapangan.
- Paato ・ パート---salah satu jenis pekerjaan non reguler yang mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga.
- Rinji ・ 臨時---(*rinji hiyatoi*) salah satu jenis pekerjaan non reguler, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh buruh harian.
- Risutora ・ リストラ---berasal dari bahasa Inggris 'restructuring' yang berarti reorganisasi aktivitas perusahaan atau bisnis. Jepang tidak menggunakan istilah 'restructuring', tetapi 'risutora' yang berarti pengurangan tenaga kerja, yaitu pemecatan atau pemberhentian kerja.
- Rojouseikatsusha ・ 路上生活者---istilah kaum *homeless* yang sering dipakai oleh orang-orang Tokyo, secara harfiah diartikan sebagai orang yang hidup di jalanan.
- Sangyo Kozo ・ 産業構造---struktur industri.
- San'ya ・ 山谷--- salah satu nama *yoseba* yang terdapat di Tokyo.
- Seikatsuhogoseido ・ 生活保護制度---sistem perlindungan hidup, yaitu suatu sistem pengadaan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diberikan oleh sektor publik kepada keluarga yang kekurangan penghasilan oleh karena alasan tertentu alasan tertentu.
- Seishain ・ 正社員---pekerja reguler, artinya pekerja tetap dalam suatu perusahaan yang berhenti bekerja setelah pensiun.
- Seizôgyô ・ 製造業者---sektor manufaktur.

- Shakaiteki haijo • 社会的排除---eksklusi sosial, yaitu suatu tindakan yang mengeluarkan seseorang dari institusi masyarakat. Dalam hal ini, kelompok tertentu dianggap sebagai orang yang terbuang dari lingkungan sosial.
- Shotoku kakusa • 所得格差---kesenjangan dalam hal pendapatan.
- Single mother--- ibu yang mengurus anak seorang diri tanpa suami.
- Shûshinkoyô • 終身雇用--- sistem kerja seumur hidup, yaitu sebuah sistem yang memberikan kesempatan bagi seorang pegawai untuk tetap bekerja dalam sebuah perusahaan mulai dari sejak masuk sampai pensiun.
- Struktur---memiliki beberapa pengertian, yaitu: (1) cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan; (2) yang disusun dengan pola tertentu; (3) pengaturan unsur atau bagian suatu benda; (4) ketentuan unsur-unsur dari suatu benda.
- Struktural---berkenaan dengan struktur.
- Struktur industri---dapat diartikan sebagai konsep perumusan asas hubungan antar individu (pekerja) dalam suatu pola susunan industri yang mengatur setiap pekerjaanya.
- Struktur perusahaan---dapat diartikan sebagai konsep perumusan asas hubungan antar pegawai dalam suatu perusahaan yang merupakan pedoman bagi setiap pegawainya.
- Subkontraktor (shitauke • 下請け)--- Kontraktor yang menerima pekerjaan pemborongan dari kontraktor lain yang lebih bonafide.
- Sutoriito chirudoren • ストリートチルドレン (street children)---anak jalanan, yaitu anak-anak miskin yang berkeliaran di jalanan untuk mencari uang. Oknum orang tua yang miskin tetapi malas berusaha akan meminta anaknya menjadi pengemis untuk dapat mencari uang dengan cara meminta-minta, mengamen, dan lain sebagainya agar kebutuhan keluarganya dapat tetap terpenuhi.
- Teori---suatu alat untuk menjelaskan gejala yang berfungsi untuk menyederhanakan penjelasan tentang gejala sosial yang cenderung rumit dan kompleks.
- Working poor • ワーキングプア---Orang yang masih miskin meskipun telah bekerja.
- Yadonashi • 宿無し---sebutan *homeless* pada zaman Tokugawa yang berarti tidak memiliki rumah tempat tinggal (*homeless*).
- Yoseba • 寄せ場--- Suatu institusi jasa bantuan pekerjaan atau tempat para buruh harian untuk mencari lowongan pekerjaan dan menunggu panggilan kerja. Tempat ini juga merupakan lokasi losmen peristirahatan bagi para buruh harian.